

# **LAKIP 2021**

## **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tersusun. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja, beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam rangka untuk mewujudkan visi daerah melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, akan memperoleh manfaat umpan balik dalam bentuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup kedepan. Sehingga masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembuatan LAKIP dimasa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima .

kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Aamiin!

Benteng, 11 Februari 2022  
KEPALA DLH,



**H. MUHAMMAD HASDAR, SKM, M. Kes.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 196209061983021007

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. ....	10
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun. ....	12
Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan DLH Tahun 2021. ....	13
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021	
Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Kinerja. ....	18
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. ....	21
Tabel 3.3 Tata Cara Perhitungan Indeks. ....	22
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. ....	25
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya. ....	27
Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Tahun 2022 Renstra. ....	28
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKA Tahun 2015 s/d 2021. ....	31
Tabel 3.8 Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021. ....	32
Tabel 3.9. Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021. ....	33
Tabel 3.10 Sungai yang dipantau Tahun 2021. ....	34
Tabel 3.11 Hasil Uji Kualitas Air Laut. ....	35
Tabel 3.12 Hasil Uji Kualitas Air Sumur. ....	36
Tabel 3.13 Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair. ....	39
Tabel 3.14 Data Limbah B3 Tahun 2021. ....	40
Tabel 3.15 Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3. ....	41
Tabel 3.16 Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2021. ....	42
Tabel 3.17 Data Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar. ....	46
Tabel 3.18 Dokumen Lingkungan Tahun 2016 s/d 2021. ....	52
Tabel 3.19 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Tahun 2021. ....	54
Tabel 3.20 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. ....	54
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi IKU dengan Target Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra. ....	55
Tabel 3.22 Perbandingan Kinerja IKU Tahun 2015 s/d Tahun 2021. ....	56
Tabel 3.23 Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021. ....	57

Tabel 3.24 Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021. ....	57
Tabel 3.25 Capaian Jakstrada Tahun 2021. ....	61
Tabel 3.26 Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2021.....	63
Tabel 3.27 Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2021.....	64
Tabel 3.28 Penanganan Sampah Sistem Kota Tahun 2021.....	65
Tabel 3.29. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. ....	66
Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi IKTL dengan Target Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra. ....	67
Tabel 3.31 Perbandingan Kinerja IKTL Tahun 2015 s/d Tahun 2021.....	67
Tabel 3.32. Perbandingan IKTL Kepulauan Selayar dengan IKTL Tingkat Provinsi dan Nasional. ....	68
Tabel 3.33 Perbandingan Kinerja IKTL Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021. ....	69
Tabel 3.34 Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2021.....	71
Tabel 3.35. Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2021.....	72
Tabel 3.36. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2021.....	73
Tabel 3.37. Perbandingan IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d Tahun 2021.....	75
Tabel. 3.38. Perbandingan IKLH dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021.....	76
Tabel 3.39. Perbandingan IKLH dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021. ....	76
Tabel 3.40. Pengukuran Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021.....	78
Tabel 3.41.Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran.....	94
Tabel 3.42. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	97
Tabel 3.42. Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2021.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1.Struktur Organisasi DLH .....	7
Gambar 2.Grafik Perkembangan IKA Tahun 2015 s/d Tahun 2021...	31
Gambar3.Grafik Perkembangan IKU Tahun 2015 s/d Tahun 2021..	56
Gambar4.Grafik Perkembangan IKTL Tahun 2015 s/d Tahun 2021..	68
Gambar 5.Grafik Perkembangan IKLH Tahun 2015s/d Tahun 2021..	75

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum DLHK.....	4
D. Isu-Isu Strategis .....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Indikator Kinerja Utama .....	11
C. Rencana Kerja Tahunan.....	13
D. Perjanjian Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. Pengukuran Kinerja .....	19
B. Analisis Capaian Kinerja .....	22
C. Realisasi Keuangan.....	97
BAB IV PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Tahun 2021 merupakan Akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 setelah dilakukan revisi kelembagaan mengenai perubahan Organisasi Perangkat Daerah. Pada tahun kelima ini, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan penggabungan fungsi antara bidang lingkungan hidup, bidang persampahan (kebersihan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonomi berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dievaluasi secara berjenjang. Dinas Lingkungan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Sedangkan sasaran strategis DLH yang telah diperjanjikan Tahun 2021 adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.



Dari hasil penilaian kinerja DLH, secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja IKU DLH 79,67 dengan kategori Baik karena ketiga indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 belum mencapai target yaitu:

- a) Indeks Kualitas Air dengan capain kinerja 99,01%. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) belum mencapai target karena terdapat perbedaan dasar perhitungan pada Surat Edaran KLHK yang menggunakan nilai IKA pada Tahun 2018 yakni 61,00 sedangkan pada Tahun 2020 nilai IKA menurun menjadi 50,00. Hal inilah yang menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar menentukan awal target pada kisaran nilai 50,50.
- b) Indeks Kualitas Udara dengan capain kinerja 98,15%
- c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian kinerja 41,84%. Indeks Kualitas tutupan lahan mengalami penurunan karena adanya perbedaan baseline data yang digunakan oleh KLHK dan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penentuan target sehingga tidak mencapai target.

Selanjutnya kinerja realisasi keuangan khususnya belanja yang menunjang sasaran DLH Tahun 2021 mencapai 98,16% atau sebesar Rp. **15.458.059.615,-** (Lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. **15.747.541.000,-** (Lima belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Uraian di atas menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kedepan diharapkan dapat melakukan peningkatan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup pada setiap tingkatan, peningkatan intensitas pemantauan kualitas lingkungan dan inventarisasi data dasar terkait masing-masing indeks, Perlunya koordinasi dengan OPD terkait lainnya dalam peningkatan infrastruktur, perbaikan kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat yang menunjang kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya. Laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai kepala instansi pemerintah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 disusun berpedoman pada Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 ini adalah untuk menyajikan

informasi tentang:

- a. Uraian singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan.
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Evaluasi dan Analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
- f. Pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
- g. Keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kinerja untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan ke depan.
- h. Sebagai sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.
- i. Sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 ini adalah :

1. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Terevaluasinya program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dalam mencapai Visi dan Misi.

3. Terciptanya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
4. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum.
5. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

### **C. Gambaran Umum DLH**

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2020 Tanggal 14 Desember Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai Berikut:

1. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Selayar, maka sudah menjadi tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sepenuhnya mendukung

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah Profesional dibidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi yang menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

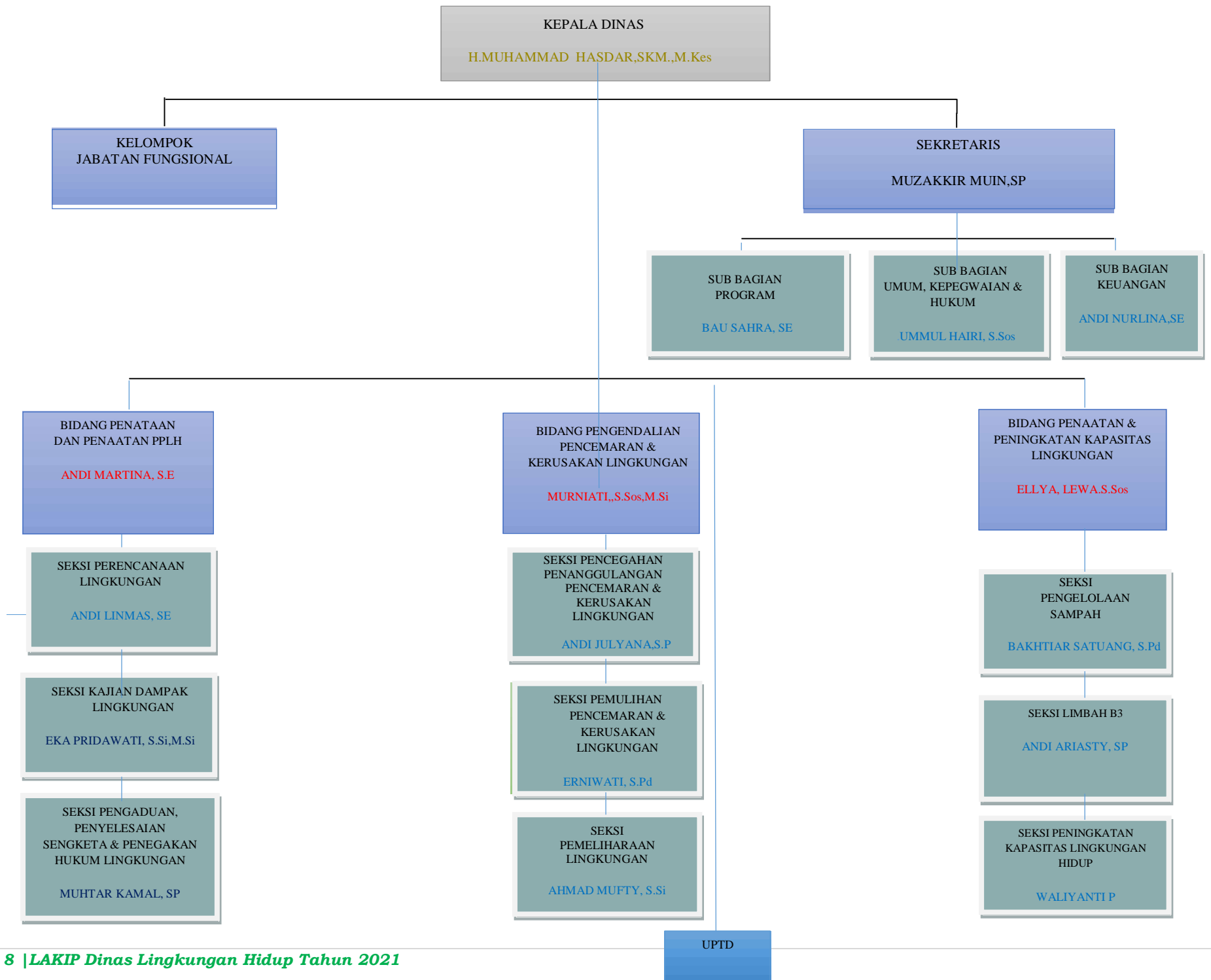
Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

- a. KepalaDinas;
- b. Sekretariat,terdiridari:
  - SubBagian Program;
  - SubBagian Umum,Kepegawaian dan Hukum;
  - SubBagian Keuangan.
- c. BidangPenataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup,terdiridari:
  - Seksi Perencanaan Lingkungan;
  - Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
  - Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
  - Seksi Pengelolaan Sampah;
  - Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,terdiri dari :
  - Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;



- Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  - Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 1.1.



#### **D. Isu-isu Strategis**

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat isu-isu strategis, antara lain:

1. Kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan melalui perluasan wilayah pelayanan kebersihan, penanganan sampah kiriman dan pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi.
6. Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup melalui akreditasi yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah dan mendukung indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional.
7. Peningkatan usaha adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan degradasi ekosistem dan peningkatan lahan kritis serta kemerosotan keanekaragaman hayati.
8. Ekosistem mangrove mempunyai nilai penting sebagai penyangga sistem kehidupan, mencegah dampak kerusakan lingkungan, mitigasi resiko bencana, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan fungsi jasa lingkungan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dari proses ini akan menghasilkan suatu rencana strategik instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini mengingat potensi lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat potensial.

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021, sebagai gambaran realitas masa depannya ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis  
Nilai Agama dan Budaya”***

Bertitik simpul dari misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode lima tahun RPJMD 2016-2021 dibidang lingkungan hidup terdapat pada misi kelima, yakni “Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”. Misi ini berfokus pada Peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam upaya memelihara fungsi dan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung upaya pencapaian visi misi tersebut. Inovasi-inovasi dimaksud terutama berkaitan dengan upaya untuk memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana misi yang akan dicapai daerah selama periode lima tahun mendatang. Mengacu pada pernyataan visi misi yang berdasarkan hasil rewiu rencana strategis tanggal 23 September Tahun 2020, menjelaskan bahwa tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja secara spesifik yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatn ya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air(IKA)	52,9	53	54	55	61,10	50,50
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	99,98	99,98	99,98	99,98	84,20	88,80
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	70,54	70,60	70,67	70,74	89,12	89,12

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERITUNGAN	SUMBERDATA
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	$IKA = 100 - (Pij / 10\%)$ $Pij = \sqrt{(Ci/Lij)^2 + (Ci/Lij)^2}$ <p>Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu metode tertentu Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lij:konsentrasi Baku Peruntukan Air(j), Ci:konsentrasi Sample parameter kualitas air(i), Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO,BOD, COD, pH,TSS</p>	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (IEU - 0,1))$ <p>Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu.</p>	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau	$IKTH = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$ $TH = \frac{LTH}{LWP}$ <p>Penghitungan indeks tutupan lahan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi.</p> $IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$	

### C. Rencana Kerja Tahunan

Untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, setiap tahun ditetapkan Rencana Kerja Tahunan. Tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam kurun waktu satu tahun dapat diukur dengan berbagai indikator yang diklasifikasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan DLH Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air(IKA)	Angka	50,50
		Indeks Kualitas Udara(IKU)	Angka	88,80
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	89,12

Untuk mencapai sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan program utama Tahun 2021, yaitu:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dimaksud untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk mengevaluasi konsekuensi dampak lingkungan dari produk dan proses-prosesnya terhadap keselamatan pekerja, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Kegiatan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota ;



- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota .
3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten dengan mengendalikan kerusakan dan pencemaran SDA dan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan :

  - a. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ;
  - b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;
  - c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program ini dimaksud untuk meningkatkan produktivitas ekosistem dalam keanekaragaman hayati masing-masing spesies yang dapat membantu keberlanjutan alam. Kegiatan:

  - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota ;
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dimaksud untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kegiatan :

  - a. Penyimpanan sementara Limbah B3;
  - b. Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dimaksud untuk mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini dimaksud untuk menginventarisasi tradisi atau pengetahuan lokal tentang hal-hal tabu/rahasia dan sakral dalam pelestarian fungsi atau pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kegiatan:

- a. Pengakuan MHA/Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH
- b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam emngembangkan dan mengelola usaha dibidang lingkungan hidup. Kegiatan :

- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kota.

#### 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksud untuk memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan perorangan atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup dan atau telah berhasil mengembangkan usaha bidang lingkungan hidup. Kegiatan :

- Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk mengidentifikasi awal, menilai sifat pengaduan dan/atau masalah serta menindaklanjuti setiap keluhan atau konflik lingkungan hidup. Kegiatan :

- Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

#### 11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksud untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Kegiatan :

- a. Pengelolaan Sampah
- b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

### **D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah maka disusunlah suatu Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Menilai keberhasilan organisasi

Dinas Lingkungan Hidup telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2021. Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas lingkungan Hidup Tahun 2021 :

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	50,50
		Indeks Kualitas Udara	88,80
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	89,12

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa input, output, outcome, benefit, dan impact. Selanjutnya dilakukan pengukuran indikator kinerja kegiatan, pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,
2. Tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja:} \\ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan kalau semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja:} \\ \frac{\text{Target (Realisasi-Target)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengukuran Kinerja**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih besar sama dengan 100%	Sangat Baik
2.	75% sampai dengan 99,99%	Baik
3.	65% sampai dengan 74,99%	Cukup
4.	50% sampai dengan 64,99%	Kurang
5.	Lebih kecil sama dengan 49,99%	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tindak lanjut dari pengukuran kinerja yang dimaksud adalah kegiatan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan. Diantaranya adalah informasi mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan sesuai perjanjian kinerja yang menjadi komitmen dalam melaksanakan tugas.



## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja dilaksanakan pada setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Capaian kinerja atau disebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerjanya untuk seluruh indikator kinerja yang ada diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Capaian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Mulai tahun 2021, nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup mulai diinput secara online melalui situs <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>, dan hasilnya diverifikasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 berdasarkan hasil verifikasi data tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021**

No.	Sasaran					Persentase Capaian(%)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	50,50	50,00	99,01	Baik
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu	88,80	87,16	98,15	Baik
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Penghitungan indeks kualitas tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luashutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi	89,12	37,29	41,84	Sangat Kurang

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>

Pada Tabel 3.2 Terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 adalah 41,84 (Sangat Kurang). Jika dibandingkan indikator kinerja lainnya yaitu Indeks Kualitas Air dengan capaian 50 (Baik) dan Indeks Kualitas Udara dengan capaian 87,16 (Baik). Hal ini terlihat bahwa nilai indeks kualitas tutupan lahan mengalami perubahan yang sangat signifikan Mengalami penurunan sebesar 51,83 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 89,12. Nilai Indeks Tutupan

Lahan mengalami penurunan disebabkan karena adanya perbedaan baseline data yang digunakan oleh KLHK dan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penentuan target. Sumber data tutupan lahan yang digunakan sebelumnya adalah data BIG yang kemudian diubah menjadi data hasil validasi dari Direktorat Standarisasi Sumber Daya Hutan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan DLHK sehingga capaian kinerja pada indikator indeks Tutupan Lahan sangat rendah.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target Renstra tahun berikutnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja instansi lain atau dengan standar nasional.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Untuk selanjutnya dapat dinilai dan dipelajari sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah sebagai berikut:

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

**Tabel 3.3**  
**Tata Cara Perhitungan Indeks**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH;BOD;COD;TSS;DO; NO3-N; Total Phosphat; Facel Coliform	$I_{pj} = \text{Indeks Pencemaran bagi peruntukan } j$ $C_i = \text{konsentrasi parameter } i \text{ (hasil pengukuran)}$ $L_{ij} = \text{Baku mutu parameter } i \text{ bagi peruntukan } j$ $M = \text{maksimum, } A = \text{Average (Rata-rata)}$ $IP_j = \sqrt{(C_i/L_{ij})^2 M + (C_i/L_{ij})^2 A}$
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO2 dan SO2	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (IEU - 0,1))$
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Faktor Koreksi: Kanal; Luasan Area Terbakar  Tutupan vegetasi hutan: -Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) -Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) -Hutan Mangrove Primer (HMP) -Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) Hutan Rawa Primer (HRP) -Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) -Hutan Tanaman	<p><b>Tutupan Lahan :</b> <b>Kabupaten/Kota</b></p> $IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50 / 54,3)$ <p>DKK = Σ rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p> <p><b>Rumus di Tutupan Hutan;</b>            W kanal di Lindung :  <math display="block">0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times (TH\_FLG\_Kanal / Luas FLEG)</math>            W kanal di Budidaya :  <math display="block">0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times (TH\_FBG\_Kanal / Luas FBEG)</math>            W terbakar di Lindung :  <math display="block">0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times (TH\_FLG\_Bakar / Luas FLEG)</math>            W terbakar di Budidaya: <math display="block">0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times (TH\_FBG\_Bakar / Luas FBEG)</math></p>
	Tutupan Vegetasi Non Hutan: -Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau -RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota, -Rehabilitasi Hutan dan Lahan (diAPL)	<p><b>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung:</b></p> <p>W kanal di Lindung :  <math display="block">0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times (BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6 \text{ Luas FLEG}</math>            W kanal di Budidaya :  <math display="block">0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times (BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6 \text{ Luas FLEG}</math>            W terbakar di Lindung :  <math display="block">0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times (BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6 \text{ Luas FLEG}</math></p>

		W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times (\text{BH FBG Bakar} + \text{BL FB G Bakar}) \times 0,6$ Luas FLEG
--	--	---

Tiga (3) komponen indeks yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan tiga indikator yang digunakan untuk menghitung nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Tital Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Dengan menghitung nilai IKLH maka sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadi bahan informasi pencapaian kinerja sesuai dengan target RPJMD Tahun 2021-2026. Nilai Indeks dapat dijadikan referensi untuk menuju angka ideal yakni nilai indeks maksimum. Semakin rendah dari nilai maksimum, semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila nilai indeks kabupaten berada dibawah target yang telah ditetapkan, maka kabupaten harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja dibawah ini :

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50,50	50,00	99,01	60,00	83,33
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,80	87,16	98,15	85,79	101,60
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	89,12	37,29	41,84	52,56	70,95
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>79,66</b>		<b>98,83</b>

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan capain tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Persentase Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	61,10	50,00	81,83	50,50	50,00	99,01
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,20	88,80	105,46	88,80	87,16	98,15
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	89,12	89,12	100	89,12	37,29	41,84
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>95,76</b>			<b>79,67</b>

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja dari 3 Indikator diatas yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 yaitu 79,67% (Baik) sedangkan rata-rata

persentase capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu 95,76% (Baik). Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 maka rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami penurunan sebesar 16,09%. Hal ini menandakan bahwa kualitas air di Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong kurang baik. Kualitas Air akan tinggi jika kualitas air sungai memenuhi baku mutu. Sedangkan dari hasil pemantauan uji kualitas air sungai di Kabupaten Selayar mayoritas belum memenuhi baku mutu.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan target tahun 2022 pada Renstra dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Tahun 2022 Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Persentase Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realiasi		Target	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,50	50,00	99,01	52,00	96,15
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,80	87,16	98,15	85,39	102,07
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	89,12	37,29	41,84	42,57	87,60
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>79,67</b>		<b>95,27</b>

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja dari 3 Indikator diatas yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 yaitu 79,67% (Baik) sedangkan rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 95,27% (Baik). Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 maka rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan kualitas sebesar 15,60% pada tahun yang akan datang.

➤ **Indikator (1) Indeks Kualitas Air**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemar dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai IKA berbanding terbalik dengan nilai IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai IKA semakin rendah. Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Evaluasi terhadap  $P_{ij}$  adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika  $0 < P_{ij} < 1,0$
2. Tercemar ringan jika  $1,0 < P_{ij} < 5,0$
3. Tercemar sedang jika  $5,0 < P_{ij} < 10,0$
4. Tercemar berat jika  $P_{ij} > 10,0$

Transformasi nilai IP ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Presentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.



Berdasarkan **Tabel 3.6**, Nilai Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 berada pada angka 50,00 dari target yang direncanakan sebesar 50,50 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,01% sehingga belum mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Nilai Indeks Kualitas Air yang diperoleh sebesar 50,00 pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra pada Tahun 2026 yaitu 60,00 maka tingkat capaian kinerjanya sebesar 83,33%. Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 15,68%. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) belum mencapai target karena terdapat perbedaan dasar perhitungan pada Surat Edaran KLHK yang menggunakan nilai IKA pada Tahun 2019 yakni 61,00 sedangkan pada Tahun 2020 nilai IKA menurun menjadi 50,00. Hal inilah yang menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar menentukan awal target pada kisaran nilai 50,50.

Dengan penetapan target IKA, maka pemerintah daerah dapat memperoleh bahan dalam pelaksanaan peningkatan IKA melalui kegiatan . Program kegiatan peningkatan kualitas air perlu dilakukan dengan diagnosis yang benar dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemaran yang ada. Proses ini dapat dilakukan melalui metode analisis Drive – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR) sehingga nilai IKA dapat ditingkatkan melalui upaya yang tepat dan efektif. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Usaha pencegahan tersebut dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada pasal 27 disebutkan bahwa pencegahan pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan melalui:

- a. Penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. Pelarangan pembuangan limbah ke sungai;
- e. Pemantauan kualitas air pada sungai;
- f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

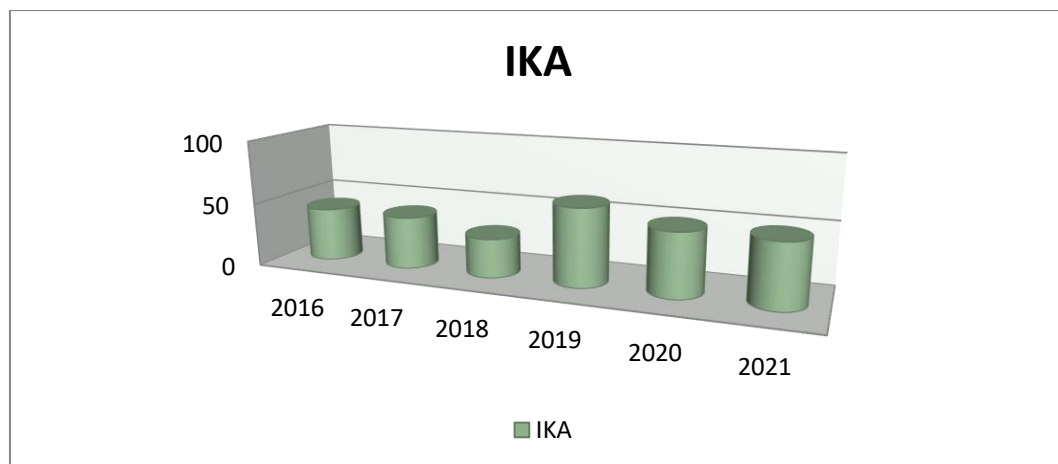
Untuk Lebih Rinci berikut adalah tabel perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2015 s/d Tahun 2021:

**Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKA Tahun 2015 s/d 2021**

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2015		52,90	
2	2016	52,9	42,01	79,41
3	2017	53	41,50	78,30
4	2018	54	30,71	56,87
5	2019	55	61,04	110,98
6	2020	61,10	50,00	81,83
7	2021	50,50	50,00	99%

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 01. Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021**



Berdasarkan grafik diatas, Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan sebesar 30,33% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan sebesar 11,04%. Nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 sebesar 50,00 mendapat predikat kurang baik jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk Lebih rinci, hasil perbandingan indeks kualitas air Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tingkat provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8. Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021**

<b>IKA Tingkat Provinsi</b>	<b>IKA Tingkat Nasional</b>	<b>IKA Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Keterangan Predikat</b>
56,82	52,70	50,00	Kurang Baik

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2021 bervariasi antara 30,71-61,04 dan memiliki kecenderungan linier menurun 0,58 poin pertahun Sementara IKA Provinsi Tahun 2015-2021 bervariasi antara 54,00-58,40 dan memiliki kecenderungan linier menurun 0,46 poin per tahun. Demikian juga dengan IKA Nasional Tahun 2015-2021 bervariasi antara 51,01-53,20 dan memiliki kecenderungan linier menurun 0,10 poin per tahun. Nilai IKA Tahun 2015-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9. Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

Tahun	IKA Tingkat Provinsi	IKA Tingkat Nasional	IKA Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan
2015	56,29	53,10	52,90	Cukup Baik
2016	55,95	50,20	42,01	Kurang Baik
2017	54,29	53,20	41,50	Kurang Baik
2018	57,70	51,01	30,71	Sangat Kurang Baik
2019	58,40	52,62	61,04	Baik
2020	54,00	52,62*	50,00	Kurang Baik
2021	56,82	52,70	50,00	Kurang Baik

Sumber: P3E Suma

Keterangan :	Nilai IKA	Predikat
	>70,01.....	Sangat Baik
	60,01–70 .....	Baik
	50,01–60 .....	Cukup Baik
	40,01–50 .....	Kurang Baik
	30,01–40 .....	Sangat Kurang Baik
	<30,01.....	Waspada

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air yang diperoleh dari:

- a. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Indeks kualitas air tahun 2021 sebesar 50,00 berdasarkan

pada 7 (tujuh) sungai di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipantau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10.**  
**Sungai yang dipantau Tahun 2021**

No.	Nama Sungai	Nilai PI	Status
1	Hulu Sungai Tabang	3,54	Cemar ringan
2	Hilir Sungai Tabang	6,69	Cemar sedang
3	Sungai Tulang	2,02	Cemar ringan
4	Hulu Sungai Teko	2,68	Cemar ringan
5	Hilir Sungai Teko	4,89	Cemar ringan
6	Hulu Sungai Bitombang	10,83	Cemar berat
7	Hilir Sungai Bitombang	3,18	Cemar ringan

Berdasarkan 7 (tujuh) sampel yang telah dianalisis dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup disimpulkan bahwa sungai yang dipantau pada tahun 2021 masih dalam kondisi cemar ringan. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal Dinas Lingkungan Hidup yang terkait, serta Dinas terkait lainnya dari Pemerintah Daerah serta pelaku usaha/kegiatan. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi.

Usaha pencegahan tersebut dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada pasal 27 disebutkan bahwa pencegahan pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan melalui Penetapan daya tampung beban pencemaran, Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai, Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan

air limbah, Pelarangan pembuangan limbah ke sungai, Pemantauan kualitas air pada sungai dan Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. Dalam mengatasi penurunan kualitas air sungai Dinas Lingkungan Hidup melakukan penanaman pada sumber mata air. Kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan sumber mata air. Selain pemantauan kualitas sungai, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, telah melakukan pemantauan kualitas air laut dan kualitas air sumur dengan hasil uji laboratorium untuk beberapa parameter saja seperti Temperatur Air, pH, TSS, COD, NO<sub>3</sub>. Untuk Parameter Besi, Amonia, Cu dan Zn tidak dilakukan pengujian karena kondisi Alat yang rusak. Hasil Pengujiannya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Hasil Uji Kualitas Air Laut**

Lokasi	Parameter									
	Temperatur	TSS	pH	Salinitas	COD	No <sub>3</sub>	Besi	Amonia	Cu	Zn
Pelabuhan Pamatata	29,6	-	8,4	40	-	0,9	-	-	-	-
Pelabuhan Benteng	29,3	-	8,51	36	-	-	-	-	-	-
Pelabuhan Pattumbukang	30,2	11	8,65	39	-	-1,1	-	-	-	-
Pelabuhan Kayuadi	28,4	200	8,01	37	3503	0,3	-	-	-	-
Pelabuhan Benteng Jampea	28,9	65	8,15	-	3268	0,8	-	-	-	-

Kondisi saat ini kualitas air laut di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memenuhi baku mutu lingkungan untuk beberapa parameter seperti Suhu dan pH. Namun TSS (kandungan Zat Tersuspensi) Pelabuhan Kayuadi tergolong tinggi yaitu 200 ppm artinya zat padat yang masuk kedalam perairan tinggi sehingga dapat menjadi indikator awal adanya pencemaran.

**Tabel 3.12.**  
**Hasil Uji Kualitas Air Sumur**

Lokasi	Parameter								
	Suhu	TDS	Ph	NO3	COD	Besi	Amonia	Cu	Zn
Sumur Jl.Veteran	33,2	702	8,17	-1,17	63	-	-	-	-
Sumur Jl.Pahlawan	33,5	887	8,28	-2,8	67	-	-	-	-
Sumur ABRI	33,1	921	7,92	0,6	-354	-	-	-	-
Sumur Saladong	29,7	423	7,66	2,5	40	-	-	-	-
Sumur Jl. Jeruk	32,6	629	8,29	3,1	82	-	-	-	-
Sumur Umum Perpustakaan	32,5	8	7,66	0,01	60	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel **3.12**, Kualitas air sumur di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memenuhi baku mutu untuk beberapa parameter seperti Suhu, pH, COD dan Nitrat sebagai N. Untuk Air Sumur di Veteran, Sumur di Pahlawan, Sumur ABRI dan Sumur di Jl. Jeruk memiliki Nilai TDS diatas 500 ppm. Parameter TDS tidak boleh melebihi 500 ppm. Hal ini dikarenakan parameter TDS juga melambangkan mineral yang terkandung di dalam air. Mineral – mineral ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang berbahaya seperti arsenik, sulfat, bromida, mangan dan lainnya serta yang baik bagi tubuh seperti calsium dan magnesium. Nilai TDS haruslah dimonitoring karena parameter ini akan mempengaruhi rasa pada air yang dikonsumsi. Faktor pemicu yang memainkan peranan terhadap perubahan kualitas air sumur di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk maka kualitas air sumur akan ikut mengalami penurunan kualitas. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mencapai target indeks kualitas air yang ditentukan seperti berikut :

1. Penambahan frekuensi pemantauan dengan lokasi pemantauan yang mewakili kondisi tercemar, agak tercemar dan tidak tercemar.
2. Waktu pemantauan juga mewakili musim kemarau dan penghujan sehingga diperoleh data yang berbeda karena kemampuan air sungai untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk ke badan sungai.
3. Perlu pengendalian pencemaran melalui edukasi dan peran aktif masyarakat melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar.
4. Pemulihan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi).
5. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai perizinan yang telah ditetapkan.
6. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik dan Usaha Skala Kecil (USK).
7. Perlunya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal.
8. Penegakan hukum terhadap industri-industri sepanjang sungai yang belum mempunyai IPAL.
9. Mendorong dunia usaha untuk peduli melalui CSR dan mendorong pelaksanaan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian LH.
10. Perlu sosialisasi yang secara terus menerus kepada publik tentang pentingnya menjaga kualitas air melalui kampanye dan gerakan hemat air.
11. Mencegah aliran air permukaan (*run off*) langsung ke sungai dan laut.



b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas LH berikut:

Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 belum melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai Peraturan Menteri LH Nomor 101 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2015, sehingga berpotensi merusak lingkungan. Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Selain itu, masih ada 1 unit Rumah Sakit Rujukan dan 2 unit Puskesmas yang belum beroperasi. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan limbah medis sebanyak 33,33 kg/hari atau sekitar 1ton(1000kg)/bulan.

Hasil uji laboratorium terhadap limbah cair terdapat parameter yang melewati baku mutu yaitu Temperatur air di Puskesmas Benteng; pH, TDS di TPA Kaburu. Tinggi atau rendahnya nilai suatu pH kemungkinan disebabkan oleh bahan bahan yang terlarut atau terbawa pada aliran limbah yang masuk ke dalam sumur penampung sehingga berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan baku mutu air kelas II sebagai sumber air baku mensyaratkan kandungan amonia maksimal 0,5 mg/l. Dan dari hasil pengujian untuk kandungan amonia di TPA Kaburu yaitu 0,07 menunjukkan bahwa kondisi tersebut memenuhi baku mutu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair**

Lokasi	Parameter						
	Temperatur	TSS	TDS	pH	DHL	COD	Amonia
Lindi TPA Kaburu	28	23	2340	10,47	2310	-61	0,07
IPAL Puskesmas Benteng	31,6	-	645	8,05	927	-	-
IPAL RSUD Hayyung	30,01	-	790	4,32	728	-	-
IPAL Puskesmas Buki	30,5	-	952	7,9	1370	-	-
IPAL Puskesmas Barugaiya	30,5	-	952	7,9	-	-	-

Sampai saat ini belum ada alat transportasi dan pengelola limbah medis (incinerator) di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga pengangkutan limbah medis difasilitasi oleh pihak ketiga melalui penandatanganan MOU antara pihak fasyankes dengan pihak ketiga. Selain itu, penghasil limbah B3 lainnya adalah PLTD, usaha perbengkelan,UMKM dan sektor pariwisata. Namun LB3 yang dihasilkan masih dalam jumlah yang sangat kecil yaitu limbah cair sebanyak 9.245,65 M<sup>3</sup> dan limbah padat sebanyak 13.699,96 Kg. Untuk lebih rinci, data limbah B3 yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14.**  
**Data Limbah B3 Tahun 2021**

Nama Fasyankes	Limbah Yang Dihasilkan							
	Cair (M3)	Perlakuan	Infeksius	Perlakuan	Benda Tajam	Perlakuan	Farmasi	Perlakuan
UPT Puskesmas Barugaiya	208,76	IPAL	39,88	TPS	1.484,85	TPS	168	Ditampung sementara
UPT Puskesmas Polebungin	2,8	IPAL	21	TPS	46	TPS	126,6	TPS
UPT Puskesmas Buki	38,95	IPAL	51	TPS	38,1	TPS	5	TPS
UPT Puskesmas Bontomatene	28,4	Bak Resapan	112,57	TPS	81,14	TPS	7,05	Ditampung sementara
UPT Puskesmas Parangia	-	IPAL	51	TPS	-	TPS	85	Limbah Cair tidak dikelola
UPT Puskesmas Bontosunggu	363	IPAL	164,5	TPS	-	TPS	17	Ditampung sementara
UPT Puskesmas Bontosikuyu	72	IPAL	58	TPS	34,5	TPS	-	-
UPT Puskesmas Lowa	-	IPAL	14,9	TPS	87,4	TPS	126,9	TPS
UPT Puskesmas Benteng	4.992	IPAL	459,4	TPS	296,8	TPS	27,2	Ditampung sementara
RSUD KH. Hayyung	3.540	IPAL	8.596,7	TPS	1.248,6	TPS	196,87	TPS Khusus
<b>TOTAL</b>	<b>9.245,65</b>		<b>9.568,95</b>		<b>3.371,39</b>		<b>759,62</b>	

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2021 sebanyak 6 (lima) buah. Pada Tahun 2021, Usaha/Kegiatan sudah wajib memiliki dokumen lingkungan yang didalamnya sudah memuat izin lingkungan. PLTS Hybrid Selayar pada Tahun 2021 telah memiliki dokumen lingkungan sehingga secara langsung sudah memiliki izin Limbah B3. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15:  
Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3**

No.	Nama	Jenis	Izin Limbah B3	Nomor Izin
1	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Nomor 002/VII/Tahun 2019
2	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 002/VII/Tahun 2019
3	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 001/VI/Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020
4	PT PLN (Persero)Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 56/II/Tahun2018, Tanggal 1 Februari 2018
5	PT PLN (Persero)Unit Layanan PLTD Selayar		Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 001/X/Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018
6	PLTS Hybrid Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Berupa Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Berdasarkan **tabel 3.15**, bahwa terdapat 6 unit usaha/kegiatan yang memiliki izin Limbah B3 sampai tahun 2021 yaitu 2 unit fasilitas kesehatan, 1 unit PLTS dan 3 unit PT PLN. Namun, masih ada jenis usaha/kegiatan pengelolaan limbah B3 yang pengangkutan limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke Tempat Pengolahan limbah B3 belum ada, sehingga untuk usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 seperti oli bekas, kain baju, dan jenis LB3 lainnya, hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan pemrosesan selanjutnya.

c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH berikut:

Kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup sebanyak 6 buah berupa:

- ◆ Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan;
- ◆ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air;
- ◆ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- ◆ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau;
- ◆ Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis sampah RT;
- ◆ Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kep.Selayar.

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan. Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada tahun 2021 sebanyak 23 usaha/Kegiatan dengan rincian usaha/kegiatan yang taat sebanyak 1 buah, usaha/kegiatan yang belum taat sebanyak 22 buah .Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16:  
Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Jenis Usaha/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Fakta dan temuan lapangan</b>	<b>Analisis Yuridis /Ketaatan</b>
1.	Hotel	Jl.Jend. Ahmad Yani	CV. Rayhan Square	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
2.	PLTD	Jl. Poros Lembang Matene	PT. PLN	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Taat
3.	Penginapan	Jl. Pesona Selayar Regency Parappa	Andi Nur Diyana, ST.,M.Si	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
4.	Penambangan Batuan Jenis Tanah Urug	Kel. Putabangun	Masriki	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
5.	Kesehatan	Jl. Dr. Muchtar No.2	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
6.	Kesehatan	Jl. Poros Bandara Aroeppala	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
7.	Penambangan Batuan Jenis Tanah Urug	Jl. Poros Bandara Aroeppala	H. Andi Baso Dewarang	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
8.	Pariwisata	Jl. Poros Tile-tile	A.A.Gede Eka Putra	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
9.	Pariwisata	Jl. Poros Tile-tile	Yusril Mahendra	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
10.	Kesehatan	Jl. K. Abdul Kadir Kasim	Direktur Rumah Sakit	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
11.	Kesehatan	Jl. Poros Benteng Pamatata	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
12.	Kesehatan	Desa Buki	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan	Belum Taat

				dan izin lingkungan	
13	Kesehatan	Kel. Batangmata	Kepala Dinas Kesehatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
14	PLTD	Kec. Pasimasunggu	PT. PLN	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
15	PLTD	Kec. Bontoharu	PT. PLN	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
16	Industri Minyak Atsiri, Bumbu Masak dan Penyedap Rasa	Dusun Kassa Bumbang Desa Bungaiya	Daniel Stassen	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
17	Café	Jl. MT.Haryono	Irham Yulandi, S,Kep	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
18	Laundry	Jl. Sutoyo	Andi Armunanto	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
19	Café	JL. W.R. Supratman	Muh. Nuzul Hidayat	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
20	SPBU	Jl. Poros Bandara H. Aroeppala	Andi Putriana	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
21	Rumah Makan	Jl. Metro	Muh. Taris	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
22	Asphalt Mixing Plant (AMP)	Kel.Bontobangun	Herry Wisal	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat
23	Penambangan Batu Gunung dan Material	Dusun Baera Desa Bontotangnga	Arfandi	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Belum Taat

Pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/suatu kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan utamanya AMDAL dan UKL-UPL terkendala Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup, sehingga kalau terjadi kasus lingkungan, masih dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan yang merupakan bentuk pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan. Salah satu bentuk pembinaan dengan membantu pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan mengkaji dampak lingkungan yang kemungkinan timbul dalam dokumen lingkungan berupa SPPL, atau UKL-UPL, atau AMDAL. Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan Tahun 2021 sebanyak 105 buah jenis izin usaha yang terdiri dari SPPL sebanyak 93 buah dan UKL-UPL sebanyak 8 buah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.17.**

**DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021**

NO.	NOMOR REKOMENDASI/ TANGGAL	JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN					NAMA USAHA	PEMRAKARSA	LOKASI			KET.
		AMDAL	UKL/UPL	SPPL	DELH	DPLH			JALAN/DESA/KEL	KECAMATAN	TITIK KOORDINAT	
1	800/1/DLH/SPPL/I/2021 (25 JANUARI 2021)			√			UD. ARGA WIJAYA	SUHRIATI	JL. KARTIKA BARU, BENTENG UTARA	BENTENG		
2	800/2/DLH/SPPL/I/2021 (25 JANUARI 2021)			√			LP2MT	BASRUM	DUSUN TENRO, DESA BONTOLEMPANGAN	BUKI		
3	800/3/DLH/SPPL/I/2021 (25 JANUARI 2021)			√			SHIFFAN BERKAH	M. SYAWAL, SE	BENTENG JAMPEA, KEL. KEMBANG RAGI	PASIMASUNGGU		
4	800/4/DLH/SPPL/I/2021 (25 JANUARI 2021)			√			CAHAYA SELAYAR	BAHTIAR	DUSUN PARAK SELATAN, KEL. PARAK	BONTOMANAI		
5	800/5/DLH/SPPL/I/2021 (25 JANUARI 2021)			√			CAHAYA SELAYAR	BAHTIAR	KOMPLEK PASAR SENTRAL BONEA, KEL. BENTENG UTARA	BENTENG		
6	800/6/DLH/SPPL/I/2021 (27 JANUARI 2021)			√			SKS CAFÉ	RENO HARTAMA PUTRA	JL. ANGKAJENG LR. 1 NO. 28, KEL. BENTENG UTARA	BENTENG		
7	800/7/DLH/SPPL/I/2021 (27 JANUARI 2021)			√			WARKOP SETIA JAYA	YEREMIA SETIAWAN	JL. YOS SUDARSO NO. 48, KEL. BENTENG	BENTENG		
8	800/8/DLH/SPPL/I/2021 (27 JANUARI 2021)			√			DAEBAK BY CHARTENZ	AZIZAH SYARIEF	JL. METRO, KEL. BENTENG UTARA	BENTENG		
9	800/9/DLH/SPPL/I/2021 (27 JANUARI 2021)			√			CHARTENZ	AZIZAH SYARIEF	JL. SYAFARUDDIN NO. 38, KEL. BENTENG UTARA	BENTENG		
10	800/10/DLH/SPPL/I/2021 (27 JANUARI 2021)			√			EKA RADIO COMMUNICATIONS	A. EKA PUTERA RINDAM	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 53, BENTENG	BENTENG		
11	800/11/DLH/SPPL/I/2021 (27 JANUARI 2021)			√			]=.19;p0\	IDAH MULYANA	JL. K.H. HAYYUNG NO. 117, BENTENG	BENTENG		
12	800/12/DLH/SPPL/II/2021 (01 FEBRUARI 2021)			√			CV. BOWTHRUSTER	A. NUR FAJAR CAVRY	JL. USMAN MUNTU NO. 5	BENTENG		
13	800/13/DLH/SPPL/II/2021 (01 FEBRUARI 2021)			√			KOPERASI LEPP-M3 TANADOANG	RAKHMAT ZAENAL	JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 18	BENTENG		
14	800/14/DLH/SPPL/II/2021 (01 FEBRUARI 2021)			√			TOKO JAYA MAKMUR	WA ODE JOOLI	JL. SYARIF AL QADRI	BENTENG		
15	800/15/DLH/SPPL/II/2021 (01 FEBRUARI 2021)			√			USAHA BARU	H. MELIADI	PULO MADU	BENTENG		
16	800/16/DLH/SPPL/II/2021 (01 FEBRUARI 2021)			√			EEB EFFORT DAN CRAFTS	NUR FITRA ANNISA	JL. SUNU NO. 01 LR. 2	BENTENG		
17	800/17/DLH/SPPL/II/2021 (01 FEBRUARI 2021)			√			DWIVA NIAGA MANDIRI	ANDI USRAN	DUSUN PARANGIA	BONTOMATENE		
18	800/18/DLH/SPPL/II/2021 (05 FEBRUARI 2021)			√			CV. IBYASH	MUH. MI'RAJ	JL. SUTOYO NO. 5	BENTENG		

19	800/19/DLH/SPPL/II/2021 (05 FEBRUARI 2021)			√		DAPUR ABE	NUR BAETI	JL. AHMAD YANI	BENTENG		
20	800/20/DLH/SPPL/II/2021 (05 FEBRUARI 2021)			√		TOKO LARISTO	HENRI GOSALI	JL. K.H. HAYYUNG NO. 161	BENTENG		
21	800/21/DLH/SPPL/II/2021 (05 FEBRUARI 2021)			√		CV. CAHAYA BINTANG SELATAN	ANDI NUR ALIM	JL. JEND. SUDIRMAN	BENTENG		
22	800/22/DLH/SPPL/II/2021 (24 FEBRUARI 2021)			√		AL BAITTS	ASHAR	JL.KENARI	BENTENG		
23	800/23/DLH/SPPL/II/2021 (24 FEBRUARI 2021)			√		AL BAITTS	ASHAR	JL.FATMAWATI	BENTENG		
24	800/24/DLH/SPPL/II/2021 (24 FEBRUARI 2021)			√		MR. COFFEE	SUCIPTO	JL.YOSSUDARSO NO.2	BENTENG		
25	800/25/DLH/SPPL/II/2021 (24 FEBRUARI 2021)			√		CV. AZIZ BAKRI	ASWANDI BAKRI,ST	JL.AROEPPALA LR.1 NO. 10	BENTENG		
26	800/26/DLH/SPPL/II/2021 (24 FEBRUARI 2021)			√		DELIMA	ANSAR ABSAR	DUSUN TANABAU	BONTOHARU		
27	800/27/DLH/SPPL/II/2021 (24 FEBRUARI 2021)			√		CV.IPA JAYA ABADI	ANDI SARIPA	DUSUN BARUGAIA	BONTOMANAI		
28	800/28/DLH/SPPL/II/2021 (26 FEBRUARI 2021)			√		PT.JARING ARUNA DAGANG INDONESIA	AHMAD ABDULLAH	JAMPEA	PASIMASUNGGU		
29	800/29/DLH/SPPL/II/2021 (26 FEBRUARI 2021)			√		PT.JARING ARUNA DAGANG INDONESIA	AHMAD ABDULLAH	JL.LAMURU	BENTENG		
30	800/30/DLH/SPPL/III/2021 (08 MARET 2021)			√		CATERING ANNISA	NUR ANNISA SALSABILA	JL.PIERRE TENDEAN	BENTENG		
31	800/31/DLH/SPPL/III/2021 (08 MARET 2021)			√		AULIA	IDAWATI	PA'GARANGANG	BONTOSIKUYU		
32	800/32/DLH/SPPL/III/2021 (24 MARET 2021)			√		TOKO VISTO JAYA	ANTO GOSALI	JL.R.A.KARTINI	BENTENG		
33	800/33/DLH/SPPL/III/2021 (24 MARET 2021)			√		TALITA SALON	AGUSTINA, S.PI	DUSUN JOONG	BONTOMANAI		
34	800/34/DLH/SPPL/III/2021 (24 MARET 2021)			√		CV.DIERRA CANTIKA PERKASA	ANDI ALFIAH	JL.S.PARMAN	BENTENG		
35	800/35/DLH/SPPL/III/2021 (24 MARET 2021)			√		AULIA ALFAT	SARIPA	DUSUN LAIYOLO	BONTOSIKUYU		
36	800/36/DLH/SPPL/III/2021 (24 MARET 2021)			√		PUTRA TUNGGAL MAS	MUH. AMING SAPIIN	DUSUN PARAK UTARA	BONTOMANAI		
37	800/37/DLH/SPPL/III/2021 (24 MARET 2021)			√		AULIA TOKO	ASWAR	DUSUN BALANG BODDONG	BONTOSIKUYU		
38	800/38/DLH/SPPL/IV/2021 (06 APRIL 2021)			√		CV.HARNUR	ST.HALIJAH	BENTENG	BENTENG		
39	800/39/DLH/SPPL/IV/2021 (12 APRIL 2021)			√		TOKO TUJU-TUJU	HJ.ANDI ROSMA	JL.KH.AHMAD DAHLANNO.40	BENTENG		
40	800/40/DLH/SPPL/IV/2021 (12 APRIL 2021)			√		TOKO AZALEA	INKA FUALTA RISTA	POROS MATALALANG	BONTOHARU		
41	800/41/DLH/SPPL/IV/2021 (21 APRIL 2021)			√		DEPOT ZHAHIRA	MUHAMMAD FAJAR SIDIK	JL.PAHLAWAN	BENTENG		
42	800/42/DLH/SPPL/IV/2021 (21 APRIL 2021)			√		TOKO LINTAS NUSANTARA BANGUNAN	SYAMSURRIJAL RAHIM	JL.AHMAD YANI	BENTENG		

43	800/43/DLH/SPPL/IV/2021 (26 APRIL 2021)			√			KIOS RIFAI	MARJASANA	DUSUN KAYU PANDA	BONTOSIKUYU		
44	800/44/DLH/SPPL/IV/2021 (26 APRIL 2021)			√			TOKO ARKANA JAYA	JUNAEDI	BTN. PARAPPA BLOK E3	BONTOHARU		
45	800/45/DLH/SPPL/IV/2021 (29 APRIL 2021)			√			PT.ENHA SAGARA UTAMA	MUHAMMAD NUZUL HIDAYAT	JL.DR.MUCHTAR NO.9	BENTENG		
46	800/46/DLH/SPPL/IV/2021 (29 APRIL 2021)			√			USAHA ROTI	AKBAR HENRO	DUSUN PAKBATTEANG	BUKI		
47	800/47/DLH/SPPL/IV/2021 (29 APRIL 2021)			√			CV. NAILA UTAMA	ANDI MUHAMMAD DARWIS	JL.KH.HAYYUNG NO.130	BENTENG		
48	800/48/DLH/SPPL/V/2021 (05 MEI 2021)			√			SIMPANG TIGA CELULER	HENNY WIJAYA	JL.KH.HAYYUNG NO.23	BENTENG		
49	800/49/DLH/SPPL/V/2021 (05 MEI 2021)			√			CV. ADI CIPTA KONSTRUKSI	ANDI APRIANDI	JL.RAUF RAHMAN	BENTENG		
50	800/50/DLH/SPPL/V/2021 (27 MEI 2021)			√			UD.TANI SEJAHTERA	MUHAMMAD IQBAL	JL.DI PANJAITANNO.30	BENTENG		
51	800/51/DLH/SPPL/V/2021 (27 MEI 2021)			√			PENJAHIT RANI	TIAR MUDA	JL.S.PARMAN LR. BAMBU	BENTENG		
52	800/52/DLH/SPPL/V/2021 (27 MEI 2021)			√			INDOTANI SEJAHTERA	AENUL YAQIL	DUSUN SILOKA	BONTOMANAI		
53	800/53/DLH/SPPL/V/2021 (27 MEI 2021)			√			RESKY ILAHI	ERNAWATI	BINANGA SOMBAIYA	BONTOSIKUYU		
54	800/54/DLH/SPPL/V/2021 (27 MEI 2021)			√			APOTIK BELAWA	DRS.AMBO UPE	JL.SULTAN HASANUDDIN	BENTENG		
55	800/55/DLH/SPPL/VI/2021 (03 JUNI 2021)			√			TOKO LESTARI	ELLY LISJHAR	JL.KH.HAYYUNG 54	BENTENG		
56	800/56/DLH/SPPL/VI/2021 (07 JUNI 2021)			√			MULIA ABADI	ABDULLAH	DUSUN JINATO	TAKABONERATE		
57	800/57/DLH/SPPL/VI/2021 (10 JUNI 2021)			√			CV.MARWAH	LEONARDO M SIREGAR,S.Pi.,M.Si	PARAPPA	BONTOHARU		
58	800/58/DLH/SPPL/VI/2021 (15 JUNI 2021)			√			F3TR SERVICE	BAHTIAR	BONTO TANGNGA	BONTOHARU		
59	800/59/DLH/SPPL/VI/2021 (15 JUNI 2021)			√			PESONA TIRTA	ELLY LISJHAR	JL.KH.HAYYUNG NO.54	BENTENG		
60	800/60/DLH/SPPL/VII/2021 (12 JULI 2021)			√			KOPERASI KAESAR KARYA PERIKANAN DAN PERTANIAN	ANDI RAJA	MARDEKAIYA MEKAR INDAH	BUKI		
61	800/61/DLH/SPPL/VII/2021 (12 JULI 2021)			√			KIOS NURBYA	NUR BAYA	DUSUN GUSUNG TIMUR	BONTOHARU		
62	800/62/DLH/SPPL/VII/2021 (12 JULI 2021)			√			CAHAYA REZKI	H.ABD.SALAM	DUSUN ERO IHU	PASIMARANNU		
63	800/63/DLH/SPPL/VII/2021 (26 JULI 2021)			√			AMANAH	ILMAWATI YASIN	JL.MUH.KARAENG BONTO	BENTENG		
64	800/64/DLH/SPPL/VII/2021 (26 JULI 2021)			√			HIKMAH LAUNDRY	MUHAMMAD HIKMAH	JL.DR.WAHIDIN SUDIRO HUSODO	BENTENG		
65	800/65/DLH/SPPL/VIII/2021 (24 AGUSTUS 2021)			√			DEPOT ER MATA	ROSMAENI	JL.TIEN SOEHARTO NO.03	BONTOHARU		
68	2 SEPTEMBER 2021			√			PONDOK REZEKI ILAHI	ISMAL SALADIN	JL.SYARIF AL QADRI LR.1 NO.36	BENTENG		

69	15 SEPTEMBER 2021			√			ROSDIANA	ROSDIANA	DUSUN BARATONTO DESA MAHARAIYA	BONTOMATENE		
70	8 OKTOBER 2021			√			SELAYAR ECO RESORT	ELLY LIANA PALINOAN	JL.AHMAD YANI	BENTENG		
71	8 OKTOBER 2021			√			SELAYAR ECO RESORT	ELLY LIANA PALINOAN	PANTAI PINANG DESA LOWA	BONTOSIKUYU		
72	8 OKTOBER 2021			√			SELAYAR ECO RESORT	ELLY LIANA PALINOAN	PANTAI PINANG DESA LOWA	BONTOSIKUYU		
73	800/66/DLH/SPPL/2021 (22 OKTOBER 2021)			√			PT.MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.	DIDIK KURNIAWAN	JL.SULTAN HASANUDDIN	BENTENG		
74	800/67/DLH/SPPL/2021 (22 OKTOBER 2021)			√			PT.MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.	DIDIK KURNIAWAN	JL.AHMAD YANI	BENTENG		
75	800/68/DLH/SPPL/2021 (22 OKTOBER 2021)			√			PT.MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.	DIDIK KURNIAWAN	JL.POROS BENTENG TONGKE- TONGKE	BONTOSIKUYU		
76	10 NOVEMBER 2021			√			AZKA MART	ZUBAIR	DUSUN TENRO DESA BONTOLEMPANGAN	BONTOSIKUYU		
77	10 NOVEMBER 2021			√			AULIA MEUBEL	MUH ARIFIN	DUSUN PADANG DESA LOWA	BONTOSIKUYU		
78	10 NOVEMBER 2021			√			AULIA BENGKEL	MUH ARIFIN	DUSUN PADANG DESA LOWA	BONTOSIKUYU		
79	19 NOVEMBER 2021			√			KELOMPOK MEKAR SARI BANGSIANG	KELOMPOK MEKAR SARI BANGSIANG	DUSUN BANGSIANG MEKAR INDAH	BUKI		
80	24 NOVEMBER 2021			√			SAHARUDDIN	SAHARUDDIN	JL.AHMAD YANI	BENTENG		
81	29 NOVEMBER 2021			√			BENGKEL HAIKAL	HASANUDDIN	JL. METRO	BENTENG		
82	1 DESEMBER 2021			√			UTAMA JAYA	NUR SAID MUTAKHIR	DUSUN BONELAMBERE TIMUR,DESA LEMBANG BAJI	PASIMASUNGGU TIMUR		
83	1 DESEMBER 2021			√			UTAMA JAYA	NUR SAID MUTAKHIR	DUSUN BONELAMBERE TIMUR,DESA LEMBANG BAJI	PASIMASUNGGU TIMUR		
84	1 DESEMBER 2021			√			UTAMA JAYA	NUR SAID MUTAKHIR	DUSUN BONELAMBERE TIMUR,DESA LEMBANG BAJI	PASIMASUNGGU TIMUR		
85	9 DESEMBER 2021			√			THE CAFFEIN	ANDIKA ARIS TABA	JL.PAHLAWAN KEL.BENTENG UTARA	BENTENG		
86	10 DESEMBER 2021			√			DEPOT NUR HIDAYAT	HAERUDDIN	DUSUN PARAK SELATAN,DESA PARAK	BONTOMANAI		
87	13 DESEMBER 2021			√			EVI'S JAYA CAKE	EVI MARDIANA	JL.AHMAD YANI LR.SALADONG NO.2A, KEL.BENTENG SELATAN	BENTENG		
88	13 DESEMBER 2021			√			CAKE MANTAP 2001 EVI'S JAYA CAKE	EVI MARDIANA	JL.SYARIF AL QADRI, KEL.BENTENG SELATAN	BENTENG		

89	13 DESEMBER 2021			√			EVI'S JAYA CAKE	EVI MARDIANA	JL.AHMAD YANI LR.SALADONG NO.2A, KEL.BENTENG SELATAN	BENTENG		
90	15 DESEMBER 2021			√			KOST BONGKO DAENG	BONGKO DAENG	JL.SISWOMIHARJO	BENTENG		
91	16 DESEMBER 2021			√			KIOS MAJU	MARTAJUDDIN	KOMPLEK PASAR SENTRAL BONEA, KEL. BENTENG UTARA	BENTENG		
92	16 DESEMBER 2021			√			KIOS MAJU	MARTAJUDDIN	KOMPLEK PASAR SENTRAL BONEA, KEL. BENTENG UTARA	BENTENG		
93	22 DESEMBER 2021			√			ALFA MIDI	RULLYANTO ( PT. MIDI UTAMA INDONESIA)	POROS BANDARA H. AROEPPALA	BENTENG		
94			√				PERTASHOP PT.IRSA JAYA PRATAMA	IRNANINGSIH.S	DUSUN BARAT ONTO, DESA MAHARAIYA	BONTOMATENE		
95			√				PERTASHOP PT.IRSA JAYA PRATAMA	IRNANINGSIH.S	DUSUN PENGGA, DESA PAMATATA	BONTOMATENE		
96			√				PERTASHOP CV. PT.TRANS ENERGY TANADOANG	PT. TRANS ENERGY TANADOANG	DESA BONTOTANGNGA	BONTOHARU		
97			√				PERTASHOP CV. PT.ASHABUL KHAHFI	CV. ASHABUL KHAFI	DUSUN TILE- TILE DESA PATIKARYA	BONTOSIKUYU		
98					√		DPLH PUSKESMAS BONTOMATENE	DINAS KESEHATAN	KELURAHAN BATANGMATA	BONTOMATENE		
99					√		DPLH PUSKESMAS RAJUNI	DINAS KESEHATAN	DESA RAJUNI	TAKABONERATE		
100					√		DPLH PUSKESMAS BARUGAIA	DINAS KESEHATAN	DESA BARUGAIA	BONTOMANAI		
101					√		DPLH PUSKESMAS BUKI	DINAS KESEHATAN	DESA BUKI	BUKI		
102	660/7/III/2021/DLH		√				RENCANA USAHA PENAMBANGAN BATU GUNUNG PT. MARGA JAMPEA	PT.MARGA JAMPEA	DUSUN BAERA UTARA DESA BONTOTANGNGA	BONTOHARU		
103	660 /16 / VI / 2021/DLH		√				PEMBANGUNAN EMBUNG SERBANGUNA BONEA TIMUR KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	SNVT AIR TANAHDAN AIR BAKU BBWS POMPENGAN JENEBERANG	DESA BONEA TIMUR	BONTOMANAI		
104	660/39/X/2021/DLH		√				PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADANG WATER CITY DI DESA BONTOSUNGGU KEC.BONTOHARU	JONNI	DESA BONTOSUNGGU	BONTOHARU		

105	660/49/XII/2021/DLH		√				PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA HYBRID SELAYAR 1,3 MWP DI BONEAPARA TANGKALA DESA PARAK KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT	DESA PARAK	BONTOMANAI		
-----	---------------------	--	---	--	--	--	---	--	------------	------------	--	--

Perbandingan Dokumen Lingkungan yang disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18:**  
**Dokumen Lingkungan Tahun 2016 s/d 2021**

No.	Tahun	Jumlah Dokumen Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UPL	AMDAL	DPLH	
1	2016	439	2	-	-	2
2	2017	114	11	-	-	7
3	2018	75	5	-	-	5
4	2019	297	11	-	-	10
5	2020	161	11	1	-	11
6	2021	93	8	-	4	8

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

➤ **Indikator (2) Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun untuk saat ini perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari

kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

IKU dihitung setelah diperoleh data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dari hasil pengukuran udara ambien yang dilakukan pada empat lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili empat jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam satu lokasi yang sama, namun minimal berjarak satu kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan empat lokasi tersebut adalah :

1. Area padat kendaraan (transportasi)

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya.

2. Area pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

3. Area perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersial adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersial akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersial.

4. Area industri

Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah industri akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan industri.



Untuk mengetahui perbaikan yang harus dilakukan dalam peningkatan IKU maka perlu diketahui hasil uji dan pemantauan kualitas udara pada tiap kawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.19.**  
**Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Tahun 2021**

Lokasi	Alamat	Parameter Uji			
		SO <sub>2</sub> (ppm)		NO <sub>2</sub> (ppm)	
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2
Transportasi	Terminal Bonea	5,43	5,83	2,42	3,24
Industri	PLTD Tangkala	16,48	15,2	12	18,69
Pemukiman	Jl.Jend.Sudirman	9,07	7,78	6,17	5,96
Perkantoran	Kantor Bupati	9,06	11,46	1,19	1,65

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>, 2021

**Tabel 3.20. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021**

No.	Kabupaten	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku mutu		Rataan	
		NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	INDEKS	
1	Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan	6.42	10.04	0.16	0.5	0.33	87.16

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>, 2021

Kualitas udara hanya diuji pada dua parameter saja. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Dari perhitungan indeks terlihat bahwa untuk Kabupaten

Kepulauan Selayar parameter SO<sub>2</sub> lebih tinggi dari NO<sub>2</sub>. Umur kendaraan besar dan konsentrasi bahan bakar di Kabupaten Kepulauan Selayar juga dapat meningkatkan kandungan SO<sub>2</sub> di udara karena pada beberapa tempat bahan bakar tidak murni 100%.

Meskipun kandungan SO<sub>2</sub> besar dan lebih tinggi dari NO<sub>2</sub>, kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Indeks Kualitas Air (IKU) cenderung mengalami penurunan dikarenakan semakin bertambahnya kendaraan dan penggunaan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, perdagangan, industri dan lain-lain sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai yang telah diperoleh.

Menurunnya nilai IKU mengindikasikan lemahnya pengelolaan di bidang kualitas udara terutama adanya sektor industri dan transportasi serta sektor lainnya yang terus berkembang sehingga menurunkan kualitas udara. Untuk meningkatkan kualitas udara perlu perbaikan dan peningkatan pengelolaan. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 sebesar 87,16, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 sebesar 85,79, maka persentase capaian kinerjanya adalah 101,60%. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan strategi pengelolaan persampahan, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat untuk mempertahankan kualitas udara. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21.**  
**Perbandingan Realisasi IKU**  
**dengan Target Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,80	87,16	98,15	85,79	101,60

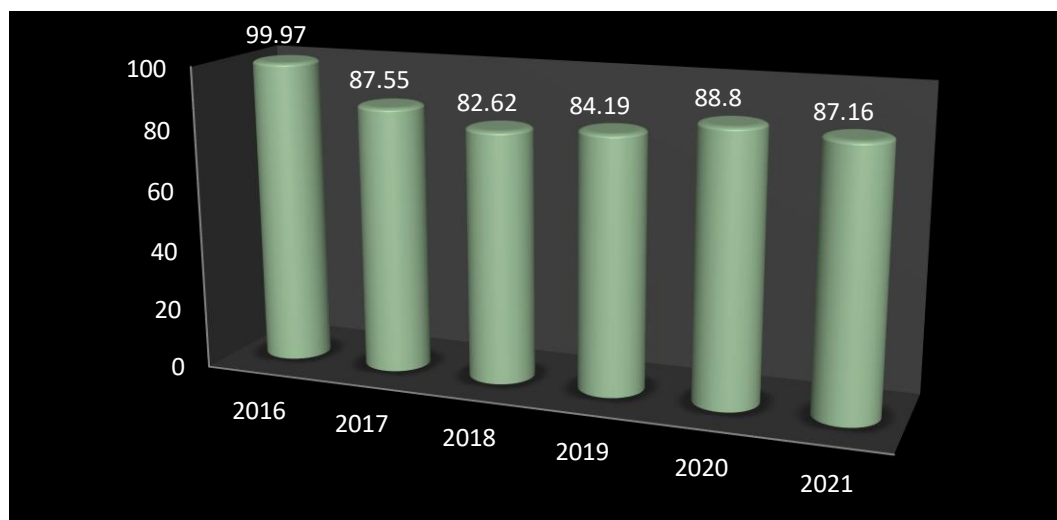
Realisasi kinerja Tahun 2021 IKU menurun 1,64 Point, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2020. Sehingga terdapat penurunan kinerja IKU sebesar 7,31 %. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2015 s/d Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22. Perbandingan Kinerja IKU Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2015		99,98	
2	2016	99,98	99,97	99,99
3	2017	99,98	87,55	87,57
4	2018	99,98	82,62	82,64
5	2019	99,98	84,19	84,20
6	2020	84,20	88,80	105,46
7	2021	88,80	87,16	98,15

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 02. Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d 2021.**



Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 87,16 masih rendah dari tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional namun masih tergolong baik. Untuk lebih rinci, perbandingan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.23. Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021**

IKU Tingkat Provinsi	IKU Tingkat Nasional	IKU Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan Predikat
89,13	87,36	87,16	Baik

Sumber Data: IKLH Prov 2021

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2015-2021 bervariasi antara 84,19-99,98 dan mempunyai kecenderungan linier menurun 1,18 poin per tahun. Sementara IKU Provinsi tahun 2015-2021 bervariasi antara 76,80-89,60 dan memiliki kecenderungan linier meningkat 2,39 poin pertahun. Demikian juga dengan IKU Nasional Tahun 2015-2021 bervariasi antara 81,78-87,03 dan memiliki kecenderungan linier meningkat 0,32 poin pertahun. Nilai IKU Tahun 2015-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24. Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

Tahun	IKU Tingkat Provinsi	IKU Tingkat Nasional	IKU Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan
2015	76,80	84,96	99,98	Sangat Baik
2016	85,80	81,78	99,97	Sangat Baik
2017	88,66	87,03	87,55	Baik
2018	89,09	84,74	82,62	Baik
2019	89,60	86,56	84,19	Baik
2020	88,73	86,56*	88,80	Baik
2021	89,13	87,36	87,16	Baik

Sumber: IKLH Prov 2021

Keterangan : <b>Nilai IKU</b>	<b>Predikat</b>
>90,00.....	Sangat Baik
70,01–90,00.....	Baik
50,00–70,00.....	Cukup Baik
30,00–49,99.....	Kurang Baik
<30,00.....	Sangat Kurang Baik

Terjadinya penurunan kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2021 dibuktikan dengan tingginya kandungan SO<sub>2</sub> dari NO<sub>2</sub> dikarenakan hal-hal berikut ini :

1. Kawasan industri (PLTD Tangkala) memang menggunakan diesel dengan solar sebagai bahan bakarnya sehingga kandungan SO<sub>2</sub> besar dan lebih tinggi dari NO<sub>2</sub>.
2. Kawasan perkantoran kandungan SO<sub>2</sub> lebih tinggi dari NO<sub>2</sub> dikarenakan tepat di samping kawasan tersebut merupakan akses keluar masuk truk ke pertambangan dengan aktivitas pengangkutan yang tinggi. Ruas jalan di depan kawasan perkantoran juga merupakan jalur untuk kendaraan truk dan kendaraan besar lainnya.
3. Pada kawasan pemukiman (Jln. Jend. Sudirman) kandungan SO<sub>2</sub> hampir sama tinggi dengan NO<sub>2</sub>. Hal ini dapat terjadi karena titik ini merupakan titik ramai lalu lintas dengan 5 lima arah lalu lintas, tanpa lampu merah dan merupakan batas kendaraan besar seperti truk untuk tidak masuk ke kota sehingga hal ini membuat lalu lintas lebih padat untuk menghindari kecelakaan tetapi tanpa disadari meningkatkan emisi gas buang kendaraan.
4. Kandungan SO<sub>2</sub> besar dan lebih tinggi dari NO<sub>2</sub> pada kawasan transportasi (Terminal Benteng) dikarenakan angkutan penumpang yang menggunakan solar lebih banyak dibandingkan dengan bensin dan umur kendaraan banyak di atas lima tahun.

Kabupaten Kepulauan Selayar hingga Tahun 2021 telah melaksanakan beberapa upaya pengendalian pencemaran udara yakni Hari Bebas Kendaraan di area taman dan lapangan pada hari minggu, kawasan bebas asap rokok di kantor-kantor, serta penambahan area parkir publik. Upaya lain yang diperlukan untuk mempertahankan dan menaikkan nilai IKU adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara melalui penyusunan inventarisasi emisi untuk mengetahui pemetaan dan roadmap sumber-sumber emisi dan beban emisi.
2. Pengendalian sumber-sumber emisi yang berasal dari:
  - a. Sumber bergerak:
  - b. Sumber tidak bergerak:
    - Penaatan baku mutu industri
    - Pengawasan implementasi izin lingkungan dan pembinaan perizinan lingkungan
3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu dan manual
4. Upaya lainnya:
  - a. Penanganan kebakaran hutan dan lahan
  - b. Penyediaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - c. Penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang aman dan nyaman
  - d. Peraturan terkait kawasan bebas asap rokok (KTR) dan
  - e. Penggunaan energi ramah lingkungan

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara yang diperoleh dari:

a. Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagai berikut:

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara dilihat dari hasil pemantauan, khususnya partikel (PM10,PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan,Identifikasi,Investigasi,serta pemberian sanksi administrasi dan/atau pidana berdasarkan tingkat pelanggarannya. Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tahun 2021 sebanyak 8 kasus dan telah ditindak lanjuti sesuai tingkat pelanggarannya.

b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH, sebagai berikut:

Pada dasarnya,secara alami alam mampu mendaur ulang berbagai jenis limbah, namun bila konsentrasil imbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding lagi dengan laju proses daur ulang,maka aka nmenimbulkan pencemaran. Polutan yang dihasilkan mayoritas dari kendaraan bermotor, asap rokok serta pembakaran dan/atau pembusukan sampah. Selama pembakaran, partikel merkuri dan hidrokarbon aromatik polisiklik akan dilepaskan. Dalam kadar yang banyak, partikel ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan saraf, kanker dan jantung. Hal ini semakin memburuk karena pembakaran sampah di tempat terbuka semakin merajalela. Yang mengakibatkan semakin menipisnya lapisan ozon dan pemanasan global merupakan dampak yang harus diwaspadai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan Bupati

Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada).

Perbandingan realisasi timbulan sampah, pengurangan dan penanganan sampah Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.25. Capaian Jakstrada Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Timbulan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	20.725,87	25.352,68	122,32	20.945,60	121
2	Pengurangan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah Rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	4.974,21	676,69	13,60	5.445,86	12,43
3	Penanganan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	15.337,14	7.426,32	48,42	15.290,29	48,57
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>61,45</b>		<b>60,67</b>

Pencapaian kinerja pengurangan sampah akan semakin baik, apabila ditunjukkan dengan semakin tingginya realisasi. Sedangkan pencapaian kinerja penanganan sampah akan semakin baik, jika ditunjukkan dengan semakin rendahnya realisasi. Pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di Kecamatan Benteng selama tahun 2021 sebesar 676,69 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 25.352,68 ton/tahun maka capaian kinerjanya



sebesar 2,67%. Jika Dibandingkan dengan tahun 2020, capain kinerja pengurangan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat 1,37%.

Sedangkan Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2021 sebesar 7.426,32 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 25.352,68 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 29,29%. Jika dibandingkan volume sampah yang dikelola 8.103,01 ton/tahun dengan timbulan sampah 25.352,68 ton/tahun, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terkelola Tahun 2021 sebesar 31,96 %. Produksi sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Benteng, sebab wilayah ini adalah pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan kegiatan lainnya, sehingga menjadikan Kota Benteng merupakan kawasan padat penduduk.

Sedangkan kinerja pengelolaan persampahan ditentukan dengan banyaknya sampah yang terkelola, baik dengan pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) maupun penanganan sistem kota. Pengurangan sampah di sumber (bank sampah dan masyarakat) ditentukan oleh pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang termanfaatkan di sumber sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang di sumber. Pengurangan ini didukung dengan kegiatan yang bisa menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah sesuai prinsip 3R (menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang). Penanganan sistem kota dengan sampah terolah menjadi bahan baku dan termanfaatkan menjadi sumber energi dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), baik sampah non organik, sampah organik, maupun sampah kertas ataupun botol, dan sejenisnya.

Kebutuhan sampah atau produksi sampah atau timbulan sampah berdasarkan SNI-19-3964-1994 untuk kota kecil di Indonesia adalah antara 1,50 - 2 liter/orang/hari. Adapun sampah yang dikelola terdiri dari

pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) dan penanganan sistem kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.26. Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2021**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan Sampah				Ket.
		(liter/hari)	(m <sup>3</sup> /hari)	(Ton/hari)	(Ton/Tahun)	
(1)	(2)	(3=(2) x 1,5)	(4=3/1.000)	(5=(4)*0,33)	(6=(5)*365)	(7)
Benteng	24.768	37.152	37,15	12,26	4.474,96	1.000 kg =1 Ton 1 Tahun = 365 hari
Bontoharu	14.917	22.375,5	22,38	7,38	2.695,13	
Bontomatene	13.596	20.394	20,39	6,73	2.456,46	
Bontomanai	14.124	21.186	21,19	6,99	2.551,85	
Bontosikuyu	15.803	23.704,5	23,70	7,82	2.855,21	
Buki	6.894	10.341	10,34	3,41	1.245,57	
Pasimasunggu	9.094	13.641	13,64	4,50	1.643,06	
Pasimarannu	10.810	16.215	16,22	5,35	1.953,10	
TakaBonerate	13.988	20.982	20,98	6,92	2.527,28	
Pasilambena	8.317	12.475,5	12,48	4,12	1.502,67	
Pasimasunggu Timur	8.011	12.016,5	12,02	3,97	1.447,39	
<b>Total</b>	<b>140.322</b>	<b>210.483</b>	<b>210,48</b>	<b>69,46</b>	<b>25.352,68</b>	

*Data Jumlah Penduduk: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2021)*

Selain melakukan penanganan sampah, juga dilakukan pengurangan sampah dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pembuatan kerajinan daur ulang menggunakan sampah kiriman dan sampah plastik. Hal ini sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 49 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tersebarinya informasi mengenai pembelian sampah oleh pihak

ketiga, mengakibatkan masyarakat mulai melirik sampah sebagai mata pencaharaan alternatif. Pengurangan sampah yang melibatkan masyarakat sebagai mitra lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.27.**  
**Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2021**

Mitra Lingkungan	Alamat	Volume (Kg)	Volume (Ton)	Keterangan
BS. Tanadoang	Jl. Metro No.1	14.056	14,06	Plastik/Kertas/Kardus
BS.Parak	Desa Parak	10.320	10,32	
BS. Pujasera	Desa Bungaiya	77.000	77	Biji Plastik
BS. Samaturu	Jl. Siswomihardjo	334.540	334,54	Kardus
BS. Metro	Kel. Benteng Utara	4.000	4	
Hj. Daeng Tabaji	Jl.Rauf Rahman	8.000	8	Kardus
P.Edi	Jl. Pahlawan	21.000	21	Besi
P.Kasuri	Jl.Jend.A.Yani	19.789	19,79	Plastik/Besi
P.A.Rahman	Kel. Benteng Utara	44.000	44	Besi
P.Ulil	Jl.Metro	42.800	42,8	Plastik Gelondongan
P.Narto	Kalepadang	5.000	5	
P.Faisal	Kel. Bontobangun	18.000	18	
P.Muh.Ilyas	Patori	3.000	3	
TPA Kaburu	Desa Kaburu	26.003	26	
P. Wadi	Desa Kaburu	15.500	15,5	
P.Sucipto	Jl.Pahlwan	10.000	10	
P.Ahmad Amiruddin	Jl. Metro	23.402	23,40	
Laboratorium LH	Jl.Jend.A.Yani	280	0,28	
<b>Total</b>		<b>676,690</b>	<b>676,69</b>	

Penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Selain itu, wilayah Kepulauan Selayar yang dikelilingi laut menyebabkan banyaknya sampah kiriman setiap musim. Pengelolaan lingkungan melalui penanganan limbah dan sampah merupakan bagian program pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan. Secara umum tingkat penanganan persampahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

menurut jenisnya masih menggunakan sistem konvensional melalui penimbunan dan sistem intensif pengelolaan terbatas untuk Kota Benteng dan sekitarnya dikarenakan belum adanya penempatan kontainer di kecamatan-kecamatan selain Kecamatan Benteng. Besarnya produksi sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar berbanding lurus dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan.

Dalam melakukan pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu buah Tempat Pengolahan Akhir (TPA) yaitu TPA Kaburu di Kecamatan Bontomanai. Selain itu terdapat 1 unit bank sampah induk yakni Bank Sampah Tanadoang di Kelurahan Benteng Utara. Untuk melayani pengangkutan sampah dalam Kota Benteng disediakan armada berupa 32 unit motor sampah berkapasitas 1 m<sup>3</sup>, truk terbuka 1 unit berkapasitas 1 m<sup>3</sup>, *dump truck* 8 unit dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup>, gerobak pilah 20 buah serta *arm roll* 7 unit kapasitas 3 m<sup>3</sup>. Rincian volume sampah yang ditangani Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.28:**  
**Penanganan Sampah Sistem Kota**  
**Tahun 2021**

Bulan	Volume (M3)	Volume (Ton)	Keterangan
JANUARI	1.702	561,66	1 m <sup>3</sup> =0,33ton
FEBRUARI	1.656	546,48	
MARET	1.710	564,30	
APRIL	1.902	627,66	
MEI	1.658	547,14	
JUNI	1.602	528,66	
JULI	1.596	526,68	
AGUSTUS	1.674	552,42	
SEPTEMBER	2.134	704,22	
OKTOBER	2.196	724,68	
NOPEMBER	2.280	752,40	
DESEMBER	2.394	790,02	
<b>Total</b>	<b>22.504</b>	<b>7.426,32</b>	

*Sumber Data : Petugas Cek Point TPA (2021)*

➤ **Indikator (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Secara umum peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) masuk ke dalam program jangka menengah maupun panjang mengingat proses rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mengurangi luasan lahan kritis, perhutanan sosial, dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan waktu yang lama.

Kinerja nyata dengan indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan ( IKTL) pada Tahun 2021 adalah sebesar 37,29 dari target yang direncanakan sebesar 89,12. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan, maka persentase capaian kinerjanya hanya 41,84%. Sehingga capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami penurunan capaian dikarenakan database luas tutupan lahan yang digunakan sebagai dasar penentuan target masih merupakan data Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018 bukan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru sehingga hasil yang diperoleh berbeda. Hasil verifikasi dan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.29. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021**

No.	KABUPATEN	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan	0.16	37.29	0	0.162023	37.29

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh, 2021>

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 sebesar 37,29, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 sebesar 52,56 maka persentase capaian kinerjanya adalah 71%. Sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Berikut adalah Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Tutupan Lahan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021 dan Target Restra 2026 :

**Tabel 3.30.**  
**Perbandingan Realisasi IKTL**  
**dengan Target Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	89,12	37,29	41,84	52,56	71

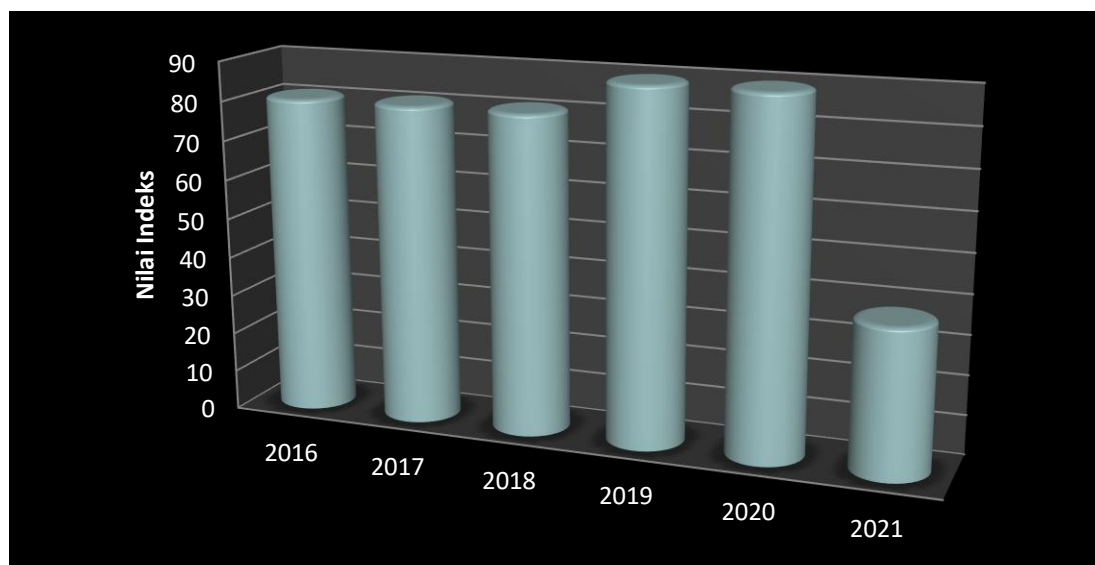
Realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 37,29 sangat menurun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar 89,12. Sehingga Tingkat penurunan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 58,16%. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2015 s/d Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.31 Perbandingan Kinerja IKTL Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

No	Tahun	IKTL		%
		Target	Realisasi	
1	2015		80,56	
2	2016	70,54	80,59	114,25
3	2017	70,60	80,59	114,15
4	2018	70,67	80,59	114,04
5	2019	70,74	89,12	125,98
6	2020	89,12	89,12	100,00
7	2021	89,12	37,29	41,84

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 03. Perkembangan IKTL Tahun 2016 s/d 2021**



Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diKabupaten Kepulauan Selayar sebesar 37,29 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kualitas tutupan lahan tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Untuk lebih rinci perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.32. Perbandingan IKTL Kepulauan Selayar dengan IKTL Tingkat Provinsi dan Nasional**

IKTL Tingkat Provinsi	IKTL Tingkat Nasional	IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan Predikat
55,40	60,72	37,29	Kurang Baik

Nilai Indeks Tutupan Lahan Tahun 2015 s/d Tahun 2021 bervariasi antara 37,29 -89,12. Sementara IKTL Provinsi bervariasi antara 50,46-63,56 dan memiliki kecenderungan linier meningkat 2,62 poin per tahun. Demikian juga dengan IKTL Nasional Tahun 2015-2019 bervariasi antara 58,42-62,00 dan memiliki kecenderungan linier meningkat 0,69 poin

pertahun. Nilai IKTL Tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.33 Perbandingan Kinerja IKTL Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

Tahun	IKTL Tingkat Provinsi	IKTL Tingkat Nasional	IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan
2015	50,46	58,55	80,56	Sangat Baik
2016	50,64	58,42	80,59	Sangat Baik
2017	54,81	60,31	80,59	Sangat Baik
2018	54,94	61,03	80,59	Sangat Baik
2019	58,06	62,00	89,12	Sangat Baik
2020	63,56	62,00	89,12	Sangat Baik
2021	55,40	60,72	37,29	Kurang Baik

Sumber: IKLH Prov,2021

Keterangan :	Nilai IKTL	Predikat
	>80,01 .....	Sangat Baik
	70,01–80 .....	Baik
	60,01–70 .....	Cukup Baik
	50,01–60 .....	Kurang Baik
	40,01–50 .....	Sangat Kurang Baik
	<40,01 .....	Waspada

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diperoleh dari:

a. Bidang Pengendalian ,Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati. Penghitungan IKTH dilakukan dengan membandingkan antara



luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah 37,29.

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Tutupan lahan juga menggambarkan banyak kegiatan manusia. Perubahan lahan akan terus berlangsung sejalan dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Penggunaan lahan yang melampaui kemampuan lahannya sangat berpotensi menyebabkan lahan terdegradasi. Jika keadaan ini terus dibiarkan akan memicu terjadinya lahan kritis. Kerusakan lahan yang semakin nyata dan meluas, ditandai oleh semakin besar adanya resiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan longsor.

Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan berbagai upaya yaitu dengan meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Oleh karena itu, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Buki, Bontomatene, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, Pasilambena dan Kecamatan Pasimasunggu.

Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose treespecies (MPTS). Jenis bibit yang diadakan untuk kegiatan

penghijauan sebanyak 11 jenis bibit yaitu mangga, sukun, pucuk merah, glodogan tiang, pala, cengkeh, durian, rambutan, lengkung sambung dan ketapang kencana. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2007, Pasal 29 tentang penataanruang yang mewajibkan luas RTH minimal 20 - 30 % dari luas kota. Selanjutnya, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau juga mewajibkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah Kepulauan Selayar yang terdiri dari RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Penambahan luas ruang terbuka hijau dapat ditingkatkan melalui penanaman pohon berbuah di lahan privat/masyarakat dan penanaman pohon jenis bunga/kembang dilahan publik.

Untuk lebih rinci, penambahan RTH Privat dan RTH Publik Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.34.**  
**Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2021**

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)						Ha
	Durian	Rambutan	Mangga	Pala	Cengkeh	Lengkeng	
Benteng	385	546	238	-	-	366	1,535
Bontoharu	313	580	350	-	-	550	1,793
Bontomanai	1691	1870	285	10333	5100	744	20,023
Bontomatene	20	10	1710	-	-	80	1,82
Buki	10	10	5085	-	3000	25	8,13
Bontosikuyu	50	715	1500	-	1200	115	3,58
Pasimasunggu Timur	50	50	-	-	-	-	0,1
Pasimasunggu	2000	2025	185	-	-	90	4,3
Pasimarannu	-	-	235	-	-	-	0,235
Pasilambena	-	6	100	-	-	-	0,106
TakaBonerate	-	-	-	-	-	-	0
<b>Total Luas Penambahan RTH Privat</b>	<b>4,519</b>	<b>5,812</b>	<b>9,688</b>	<b>10,333</b>	<b>9,3</b>	<b>1,97</b>	<b>41,622</b>

**Tabel 3.35.  
Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2021**

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)					Ha
	Palem Putri	Pucuk Merah	Ketapang Kencana	Cemara Laut	Tabebuaya	
Benteng	120	688	205	-	241	1,489
Bontoharu	55	230	90	50	735	1,83
Bontomanai	200	1561	100	-	1297	3,243
Bontomatene	275	350	265	-	130	1,23
Buki	-	165	170	-	140	0,725
Bontosikuyu	150	1500	320	-	251	4,041
Pasimasunggu Timur	-	100	-	-	100	0,2
Pasimasunggu	100	320	200	-	250	1,27
Pasimarannu	30	400	130	-	300	0,91
Pasilambena	-	-	-	-	-	0
TakaBonerate	-	-	1000	-	-	1
<b>Total Luas Penambahan RTH Publik</b>	<b>0,93</b>	<b>5,314</b>	<b>2,48</b>	<b>0,05</b>	<b>3,444</b>	<b>15,938</b>

Tahun 2021, luas RTH Publik sebesar 1.884,97 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.703 Ha atau sebanyak 1,39%. Untuk lebih rinci, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.36.**  
**Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2021**

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH Publik (Ha)	% RTH Publik	Ket.
	Km2	Ha			
Benteng	24,63	2.463	53,74	0,03	
Bontoharu	128,12	12.812	43,05	0,01	
Bontomanai	136,42	13.642	436,20	3,20	
Bontomatene	193,05	19.305	27,23	0,14	
Buki	68,14	6.814	1117,39	16,40	
Bontosikuyu	248,22	24.822	65,54	0,26	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,5	0,45	
Pasimasunggu	131,80	13.180	36,63	0,28	
Pasimarannu	195,33	19.533	41,04	0,21	
Pasilambena	114,88	11.488	30	0,26	
TakaBonerate	49,30	4.930	3,6	0,07	
<b>Total RTH</b>	<b>1357,03</b>	<b>135.703</b>	<b>1884,97</b>	<b>1,39 %</b>	

Kegiatan yang dilakukan untuk program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota. Melakukan penghijauan dengan menanam bibit tanaman pada Ruang Terbuka Hijau baik di RTH Privat maupun RTH publik, Taman Kehati lainnya yang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi dengan 1 lokasi pelaksanaan yaitu penanaman sukun di 1 Desa.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan laju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka memenuhi kebutuhan mahluk hidup. Hal ini mengakibatkan kondisi lingkungan hidup diindikasikan menurun karena penggunaan sumberdaya alam dan pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya semakin meningkat. Sementara laju pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya alam yang relatif tetap.

Mulai Tahun 2021, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang dicapai ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.I/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan dengan target sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) : 50,50
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) : 88,80
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) : 89,12
4. Penginputan Data Pemantauan

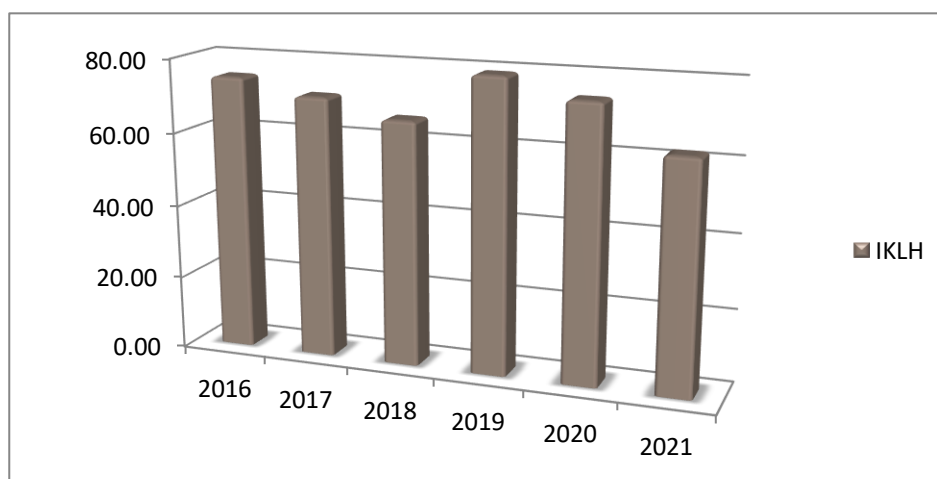
Hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh kabupaten/kota lalu diinput ke dalam format yang tersedia pada <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login> yang kemudian akan diverifikasi oleh Tim dari Provinsi dan Pusat. Sehingga capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup Tahun 2021, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat pada hasil verifikasi data IKLH pada situs tersebut. IKLH pada Tahun 2021 didukung oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 50,00, Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,80, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 89,12. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.37. Perbandingan IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2015	52,90	99,98	80,56	78,08
2016	42,01	99,97	80,59	74,83
2017	41,50	87,55	80,59	70,86
2018	30,71	82,62	80,59	66,23
2019	61,04	84,19	89,12	79,21
2020	50,00	88,80	89,12*	74,28
2021	50,00	87,16	37,29	62,27

Sumber: DLH Tahun 2021

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 s/d 2021, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 sebesar 62,27, jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 79,53 maka persentase capaian kinerjanya adalah 93,40%. Sehingga upaya yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan kajian lingkungan hidup strategis, meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3 serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 62,27 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Untuk lebihrinci, perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021,dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.38. Perbandingan IKLH dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021**

<b>IKLH Tingkat Provinsi</b>	<b>IKLH Tingkat Nasional</b>	<b>IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Keterangan Predikat</b>
72,23	67,71	62,27	Sedang

*Sumber Data: IKLH Prov 2021*

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2015-2021 bervariasi antara 62,27-79,21 dan memiliki kecenderungan linier menurun 0,76 poin per tahun. Sementara IKTL Provinsi bervariasi antara 67,01-74,83 dan memiliki kecenderungan linier meningkat 0,94 poin per tahun. Demikian juga dengan IKTL Nasional Tahun 2015-2019 bervariasi antara 64,84-71,67 dan memiliki kecenderungan linier meningkat 0,34 poin per tahun. Untuk lebih rinci Perbandingan IKLH dengan Tingkat Provinsi dan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.39.  
Perbandingan IKLH dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2015 s/d Tahun 2021**

<b>Tahun</b>	<b>IKLH Tingkat Provinsi</b>	<b>IKLH Tingkat Nasional</b>	<b>IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Keterangan Predikat</b>
2015	67,01	64,84	78,08	Baik
2016	70,54	65,73	74,83	Baik
2017	73,24	66,46	70,86	Baik
2018	74,83	71,67	66,23	Cukup Baik
2019	67,61	66,55	79,21	Baik
2020	71,74	66,55*	74,28	Baik
2021	72,23	67,71	62,27	Cukup Baik

*Sumber: P3Esuma*

Keterangan :	Nilai IKLH	Predikat
	> 80 .....	Sangat Baik
	70,01–80 .....	Baik
	60,01–70 .....	Cukup Baik
	50,01–60 .....	Kurang Baik
	40,01–50 .....	Sangat Kurang Baik
	<40,01 .....	Waspada

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang menghasilkan output yang menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program,kegiatan, pagu, realisasi anggaran, target dan output yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.40.  
Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Output	Realisasi Output	Capaian Kinerja (%)	Ket.
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan internal DLH</b>	<b>8.105.471.600</b>	<b>7.737.788.373</b>	<b>95,46</b>		
	<b>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun</b>	<b>71.635.380</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	29.060.380	3 Dok	3 Dok	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	3.798.510	1 Dok	1 Dok	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	3.245.235	1 Dok	1 Dok	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1.448.725	1 Dok	1 Dok	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	2.362.860	1 Dok	1 Dok	100	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD)	4.938.335	3 Dok	3 Dok	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, MonevPK)	26.781.335	13 Dok	13 Dok	100	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun</b>	<b>3.276.747.686</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang tersedia	3.225.634.871	39 Orang	39 Orang	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.355.660	1 Dok	1 Dok	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	44.669.555	12 Dok	12 Dok	100	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K yang penyampaiannya Tepat Waktu	3.087.600	12 Lap	12 Lap	100	

	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun</b>	<b>192.482.545</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>	<b>100</b>	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pendapatan retribusi sampah	192.482.545	1 Dok	1 Dok	100	
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun</b>	<b>37.330.390</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>	<b>100</b>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	21.173.660	1 Dok	1 Dok	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Barang Persediaan/Asset (Barjas)	16.156.730	1 Dok	1 Dok	100	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian DLH yang tersusun</b>	<b>41.786.490</b>	<b>27,27%</b>	<b>27,27%</b>	<b>100</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi Kepegawaian	19.016.670	4 Lap	4 Lap	100	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terlaksana	15.839.200	1 Buah	1 Buah	100	

	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja ASN	6.930.620	1 Dok	1 Dok	100	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase administrasi umum yang terlaksana efektif</b>	<b>155.899.501</b>	<b>45,45</b>	<b>116,29%</b>	<b>255,85</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan kelengkapan kerja yang disediakan	7.623.000	8 Buah	10 Buah	125	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	5.365.300	8 Lembar	29 Lembar	362,5	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar	6.700.000	5 Eks	3 Eks	60	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	10.825.000	50 Orang	105 Orang	210	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi DLH	125.386.201	40 Lap.	106 Lap.	265	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Aset DLH yang terlaksana</b>	<b>152.342.000</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja	49.355.000	3 Buah	3 Buah	100	
Jumlah Kursi Kerja		7 Buah		7 Buah			
Jumlah Alat Penyimpan Arsip		1 Buah		1 Buah			

	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah AC atau Kipas Angin	102.987.000	4 Unit	4 Unit	100	
		Jumlah Laptop/Komputer		6 Unit	6 Unit		
		Jumlah Printer		4 Unit	4 Unit		
		Jumlah Scanner		1 Buah	1 Buah		
		Jumlah Speaker		1 Unit	1 Unit		
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase layanan jasa penunjang DLH</b>	<b>2.714.022.638</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim tepat waktu	39.354.010	300 buah	439 buah	146,33	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Telpon, Listrik dan Air	44.129.428	7 buah	12 buah	171,43	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan umum kantor DLH	2.630.539.200	100%	100%	100	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD DLH yang terawat</b>	<b>1.137.328.233</b>	<b>41,67%</b>	<b>42,28%</b>	<b>101,47</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dirawat	41.499.770	2 Buah	2 Buah	100	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat	947.223.513	40 Buah	40 Buah	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang dirawat	89.957.500	2 Buah	2 Buah	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Perlengkapan Kantor yang dirawat	15.759.750	6	7	105,26	
	Persentase Peralatan Kantor yang dirawat		13	13		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor yang dirawat	947.223.513	5%	5%	5%	
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi</b>	<b>132.356.300</b>	<b>12,50%</b>	<b>37,50</b>	<b>300</b>	
<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Instrumen Perencanaan dan Pemanfaatan LH tersusun</b>	<b>80.820.000</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100</b>	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	80.820.000	3 dok	3 dok	100	

<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Instrumen Pengendalian LH yang tersusun</b>	<b>51.536.300</b>	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>	<b>100</b>	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang dinilai	34.108.100	1 dok	1 dok	100	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk Kajian Rencana Program yang dinilai	17.428.200	1 dok	1 dok	100	
<b>Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>51.739.800</b>	<b>40%</b>	<b>5%</b>	<b>13</b>	
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi penerapan Dokumen Lingkungan</b>	<b>51.739.800</b>	<b>8,06%</b>	<b>28%</b>	<b>348%</b>	

	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang dikaji	26.225.600	3 Dok	3 Dok	100	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL, SPPL, UKL_UPL yang dipantau	18.633.000	5 Buah	23 Buah	460	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL, SPPL, UKL_UPL yang dibina	6.881.200	1 Buah	1 Buah	100	
	<b>Program Penanganan Pengaduan Kegiatan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa LH</b>	<b>15.324.200</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	
	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>15.324.200</b>	<b>2 Kasus</b>	<b>2 Kasus</b>	<b>100</b>	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap	Jumlah Pengaduan/Kasus	5.175.000	2 Kasus	7 Kasus	350	



	PPLH Kabupaten/Kota	Lingkungan yang diterima					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Kasus Lingkungan yang dikoordinasikan dengan RPPLH (Kasus yang diselesaikan)	10.149.200	1 Buah	1 Buah	100	
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Pencemaran Status Mutu Air</b>	<b>686.979.490</b>	<b>7,16</b>	<b>2,75</b>	<b>38,41</b>	
	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu</b>	<b>95.476.890</b>	<b>14,29</b>	<b>29,72</b>	<b>207,98</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas lingkungannya	37.362.930	15 Lokasi	26 Lokasi	174	

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil uji air	58.113.960	7 LHU	26 LHU	260	
	Jumlah laporan hasil uji udara ambien		3 LHU			
<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH</b>	<b>22.806.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	<b>50</b>	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah data dan informasi lingkungan yang dipublikasikan	22.806.000	1 Buah	1 Buah	100	
<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH</b>	<b>568.705.600</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,01%</b>	<b>50</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Panjang garis pantai yang dibersihkan	42.538.150	1 Km	0,95 Km	95	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas Lahan Kritis yang direboisasi	384.311.400	1 Ha	13,16 Ha	1.316	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lokasi Sumber Mata Air yang dikonservasi	141.856.050	1 Lks	1 Lokasi	100	
<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Presentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola</b>	<b>2.874.117.156</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,38%</b>	<b>101</b>	

	<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Luasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola</b>	<b>2.874.117.156</b>	<b>1858,51 Ha</b>	<b>1884,97 Ha</b>	<b>102</b>	
	Pengelolaan Taman Kehati di luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati yang direncanakan dan dikembangkan	29.690.450	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH Publik yang diawasi dan dikendalikan	2.789.343.856	20 ha	15,94 Ha	80	
	Pengelolaan Taman Kehati Lainnya	Jumlah Species flora lokal yang dikonservasikan	32.499.100	1 spesies	1 spesies	100	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kehati	Jumlah RTH yang dipelihara (sarana Bermain)	22.583.750	1 Lokasi	1 Lokasi	100	
	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai izin Limbah B3</b>	<b>19.542.770</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,018%</b>	<b>90</b>	
	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Jumlah Limbah B3 Cair yang dikendalikan</b>	<b>19.542.770</b>	<b>5.220 m3</b>	<b>9.245,65 m3</b>	<b>178</b>	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dibina	14.630.350	5 Buah	5 Buah	100	

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang diberi izin	4.912.420	1 Buah	1 Buah	100		
<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH</b>	<b>Persentase Desa yang Berbudaya Lingkungan</b>	<b>19.916.000</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,19%</b>	<b>16,67</b>		
<b>Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah Desa yang Ditetapkan sebagai Desa Berseri</b>	<b>19.916.000</b>	<b>1 Buah</b>	<b>15 Buah</b>	<b>1.500</b>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	Jumlah Masyarakat Adat yang dibina sebagai Kader Lingkungan	19.916.000	15 Orang	16 Orang	106,67		

	Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH						
	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Mitra yang Berkinerja dalam Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>51.513.646</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>	<b>90</b>	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Mitra LH yang terdampingi</b>	<b>51.513.646</b>	<b>5 Buah</b>	<b>3 Buah</b>	<b>60</b>	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok daur ulang sampah non organik yang dikembangkan	51.513.646	20 Buah	25 Buah	108,69	
	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Mitra LH yang Berprestasi</b>	<b>8.444.290</b>	<b>21,74%</b>	<b>21,74%</b>	<b>100</b>	
	<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Masyarakat/Mitra LH yang Memperoleh Penghargaan Tingkat Kabupaten</b>	<b>8.444.290</b>	<b>1 Buah</b>	<b>1 Buah</b>	<b>100</b>	

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Masyarakat/LM/DU/DP dalam rangka Kota Sehat/Adipura	8.444.290	1 Buah	3 Buah	100	
<b>Program Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Persampahan</b>	<b>3.818.542.100</b>	<b>22,22 %</b>	<b>19,75%</b>	<b>88,89</b>	
<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah sampah yang terkelola</b>	<b>3.818.542.100</b>	<b>9.333 Ton</b>	<b>8.103,01 Ton</b>	<b>87</b>	
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah terkelola 3R	301.909.200	633 Ton	863,36	137	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah tertimbun per hari	310.037.250,00	7.500 Ton	7.426,32 Ton	99,02	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang menjadi kompos	14.402.100	1.200 ton	672,8	672,8	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana yang dikoordinasikan penyediaannya	23.268.000	2 Buah	2 Buah	100	
	Penyediaan Kebijakan Persampahan Kerjasama Pengelolaan	Jumlah produk hukum lingkungan yang disosialisasikan	19.205.950	1 Buah	5 Buah	500	
	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras pengelolaan TPA	3.149.719.600	53 Unit	53 Unit	100	
<b>JUMLAH</b>			<b>15.458.059.615</b>			<b>95%</b>	

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021, maka tingkat efisiensi dan efektifitas harus diukur. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan efektifitas diukur dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan dana yang digunakan. Sehingga pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2021 memiliki Tingkat Efisiensi sebesar 0,85 % atau dengan predikat kurang efisiensi karena kurang dari 1%. Sedangkan Tingkat Efektivitasnya sebesar 1,18% atau dengan predikat efektifitas karena lebih dari 1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.40.**  
**Tingkat Efektifitas dan**  
**Efisiensi Kinerja Sasaran**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	50,5	50,00	99,01	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	142.324.200	132.356.300	93,00
		Indeks Kualitas Udara	Angka	88,8	87,16	98,15	2. Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	58.153.200	51.739.800	88,97
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	89,12	37,29	41,84	3. Penanganan Pengaduan Kegiatan Lingkungan Hidup	18.896.000	15.324.200	81,10
							4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	703.513.200	686.979.490	97,65
							5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.917.500.400	2.874.117.156	98,51
							6. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	19.729.600	19.542.770	99,05

							7. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	20.000.000	19.916.000	99,58	
							8. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	52.859.600	51.513.646	97,45	
							9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	10.000.000	8.444.290	84,44	
							10. Pengelolaan Sampah	3.841.435.400	3.818.542.100	99,40	
<b>Rata-Rata Capaian Dari 3 Indikator</b>							<b>79,67</b>	<b>Total Persasaran</b>	<b>7.784.411.600</b>	<b>7.678.475.752</b>	<b>93,92</b>
<b>TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 0.85% (TIDAK EFISIEN jika kurang dari 1) realisasi kinerja dibagi rencana kinerja</b>											
<b>TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 1.18% (EFEKTIVITAS jika lebih dari 1) output kinerja dibagi input dana</b>											

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun, Menetapkan dan Mengendalikan Pelaksanaan RPPLH secara optimal;
2. Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara berkala;
3. Melakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui gerakan kali bersih, gerakan jumpa berlian.
4. Melakukan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pembuatan lubang biopori, sumur resapan dan breakwater serta transplantasi karang;
5. Melakukan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
6. Melakukan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati melalui gerakan penanaman pohon berbunga dan berbuah;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan melalui fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan/izin PPLH/izin limbah B3/izin pengelolaan sampah;
8. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. Melakukan pengelolaan sampah terpadu melalui pembentukan Bank Sampah dan rumah kompos disetiap Kecamatan/Desa/Kelurahan;
10. Melakukan pengangkatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup;

11. Harga pembelian sampah oleh Bank Sampah Induk dinaikkan dari harga pembelian para pemulung/mitra/Bank Sampah Unit;
12. Melakukan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan memasyarakatkan pemakaian pupuk organik

### C. Realisasi Keuangan

Analisis capaian keuangan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas LRA, LO, NERACA, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta diterapkannya sistem dan prosedur akuntansi secara berkelanjutan. Gambaran umum tentang realisasi capaian keuangan untuk Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 mencapai 98% dari total anggaran sebesar Rp.15.747.541.000,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah) dengan realisasi serapan sebesar Rp.15.458.059.615,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Belas rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.41.**  
**Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Pendapatan	236.775.000,-	324.140.000,-	136,90
2.	Belanja Tidak Langsung	3.415.290.000,-	3.332.034.871,-	97,56
3.	Belanja Langsung	12.332.251.000,-	12.126.024.744,-	98,33

Sumber: Bagian Keuangan DLH Tahun 2021

Kinerja keuangan pada program dan kegiatan yang mendukung sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.42**  
**Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan internal DLH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.963.129.400</b>	<b>7.779.574.863</b>	<b>97,70</b>	<b>Baik</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>88.861.000</b>	<b>71.635.380</b>	<b>80,62</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	50%	50%	3.362.635.200	3.276.747.686	97,45	Baik
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun	28,57%	28,57%	195.252.400	192.482.545	98,58	Baik
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun	28,57%	28,57%	41.859.200	37.330.390	89,18	Baik

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian DLH yang tersusun	27,27%	27,27%	43.919.200	41.786.490	95,14	Baik
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang terlaksana efektif	45,45	116,29%	184.588.000	155.899.501	84,46	Baik
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Aset DLH yang terlaksana	20%	20%	152.342.000	152.342.000	100,00	Sangat Baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang DLH	100%	100%	2.719.092.400	2.714.022.638	99,81	Baik
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD DLH yang terawat	41,67%	42,28%	1.174.580.000	1.137.328.233	96,83	Baik
	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi</b>	<b>12,50%</b>	<b>37,50%</b>	<b>142.324.200</b>	<b>132.356.300</b>	<b>93,00</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Perencanaan dan Pemanfaatan LH tersusun	50%	50%	86.518.600	80.820.000	93,41	Baik

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Pengendalian LH yang tersusun	66,67%	66,67%	55.805.600	51.536.300	92,35	Baik
<b>Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>40%</b>	<b>5%</b>	<b>58.153.200</b>	<b>51.739.800</b>	<b>88,97</b>	<b>Baik</b>
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi penerapan Dokumen Lingkungan	8,06	28%	58.153.200	51.739.800	88,97	Baik
<b>Program Penanganan Pengaduan Kegiatan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa LH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18.896.000</b>	<b>15.324.200</b>	<b>81,10</b>	<b>Baik</b>
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	2 Kasus	2 Kasus	18.896.000	15.324.200	81,10	Baik

	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	<b>Indeks Pencemaran Status Mutu Air</b>	<b>7,16</b>	<b>2,75</b>	<b>703.513.200</b>	<b>686.979.490</b>	<b>97,65</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	14,29	29,72%	97.197.600	95.476.890	98,23	Baik
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,02%	0,01%	23.549.600	22.806.000	96,84	Baik
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,02%	0,01%	582.766.000	568.705.600	97,59	Baik
	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,38%</b>	<b>2.917.500.400</b>	<b>2.874.117.156</b>	<b>98,51</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	1.858,51 Ha	1.884,97 Ha	2.917.500.400	2.874.117.156	98,51	Baik
	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai izin Limbah B3</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,018%</b>	<b>19.729.600</b>	<b>19.542.770</b>	<b>99,05</b>	<b>Baik</b>



	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Cair yang dikendalikan	5.220 m3	9.245,65 m3	19.729.600	19.542.770	99,05	Baik
	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH</b>	<b>Persentase Desa yang Berbudaya Lingkungan</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,19%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.916.000</b>	<b>99,58</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Desa yang Ditetapkan sebagai Desa Berseri	1 Buah	15 Buah	20.000.000	19.916.000	99,58	Baik
	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Mitra yang Berkinerja dalam Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>	<b>52.859.600</b>	<b>51.513.646</b>	<b>97,45</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra LH yang terdampingi	5 Buah	3 Buah	52.859.600	51.513.646	97,45	Baik
	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Mitra LH yang Berprestasi</b>	<b>21,74%</b>	<b>20%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.444.290</b>	<b>84,44</b>	<b>Baik</b>

	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Mitra LH yang Memperoleh Penghargaan Tingkat Kabupaten	1 Buah	1 Buah	10.000.000	8.444.290	84,44	Baik
	<b>Program Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Persampahan</b>	<b>22,22%</b>	<b>19,75%</b>	<b>3.841.435.400</b>	<b>3.818.542.100</b>	<b>99,40</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	9.333 Ton	8.103,01 Ton	3.841.435.400	3.818.542.100	99,40	Baik
<b>JUMLAH</b>					<b>15.747.541.000</b>	<b>15.458.059.615</b>	<b>98,16</b>	<b>Baik</b>

## IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

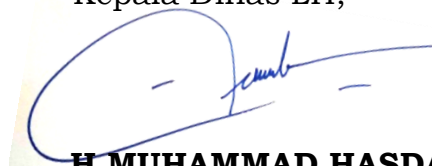
Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut : Ketiga indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Air tahun 2021 sebesar 50,00 hampir mencapai target yang ditetapkan 50,50. Indeks Kualitas Udara sebesar 87,16 menurun 1,7 dibandingkan tahun 2020 (88,80). Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2021 yaitu 37,29 tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu 89,12, menurun 51,90 dari tahun 2020. Secara umum capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 berada pada kategori 'Sedang' dengan nilai IKLH 62,27 tetapi diperlukan perbaikan untuk mencapai target pada Tahun 2022 yakni 63,46.

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimasa yang akan datang , maka dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga Strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tingkatan, peningkatan intensitas pemantauan kualitas lingkungan dan inventarisasi data dasar terkait masing-masing indeks, Perlu koordinasi dengan OPD terkait lainnya dalam peningkatan infrastruktur, perbaikan kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat yang menunjang kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif,transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga laporan ini dapat berfungsi sebagai alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah serta menjadi media pertanggungjawaban, baik kepada lembaga legislatif maupun kepada publik serta mampu memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.

Benteng, 04 Februari 2022

Kepala Dinas LH,



**H.MUHAMMAD HASDAR,SKM.,M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 196209061983021007















13. .









































## **D. Realisasi Keuangan**



